



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201805958, 8 Maret 2018

Pencipta

Nama : **Dr. Fahrudin Z. Olilingo, SE., M.Si**
Alamat : Jalan Gelatik RT 002/RW 002. Kelurahan Heledulaa Utara Kota Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo, 96119
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Fahrudin Z. Olilingo, SE., M.Si**
Alamat : Jalan Gelatik RT 002/RW 002. Kelurahan Heledulaa Utara Kota Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo, 96119
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Perubahan Struktur Dan Distribusi Pendapatan**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 4 Mei 2014, di Gorontalo

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000102785

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Fachrudin Z. Olilingo



Fachrudin Z. Olilingo

PERUBAHAN STRUKTUR DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

ideas
PUBLISHING

PERUBAHAN STRUKTUR
DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

Fachrudin Z. Olilingo

**PERUBAHAN STRUKTUR
& DISTRIBUSI
PENDAPATAN**



IP.102.04.2014

**PERUBAHAN STRUKTUR
& DISTRIBUSI
& PENDAPATAN**

Pertama kali diterbitkan dalam Bahasa Indonesia

Oleh Ideas Publishing, Mei 2014

Alamat:

Jl. Gelatik No. 24 Kota Gorontalo

Telp/Fax. 0435 830476

e-mail: infoideaspublishing@gmail.com

Anggota Ikapi, Februari 2014

Penata Letak, Ilustrasi dan Sampul

Tim Kreatif Ideas Publishing

ISBN : **978-602-1396-12-4**

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Sujud syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kemudahan dan keselamatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan buku ini. Demikian pula dalam penulisan buku yang sederhana ini, penulis mendapat banyak tantangan namun dengan semangat dan dukungan dari berbagai pihak serta kesabaran sujud syukur Alhamdulillah buku ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini adalah interpretasi dari penelitian penulis yang mengangkat masalah peranan sektor industri dalam perekonomian wilayah dan dampaknya terhadap distribusi pemakaian input dan ketimpangan antar sektor di provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan pendekatan analisis Rowscaler dan columnscaler serta korelasi pearson.

Berdasarkan masalah yang di atas, penulis mendapatkan Hasil bahwa sektor industri sangat berperan dalam mempercepat pembangunan ekonomi karena terbukti sanggup menciptakan dampak ganda (*multiplier*) baik Tipe I maupun Tipe II dalam perekonomian wilayah khususnya dalam pendapatan dan kesempatan kerja. Peran sektor industri ini tidak lepas dari kemampuannya dalam memberikan kontribusi terhadap struktur output sektoral, permintaan akhir, distribusi pemakaian input, volume ekspor dan kesempatan kerja yang akhirnya berdampak pada perubahan struktural.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis tak lupa menyampaikan terima kasih kepada isteri tercinta Ir.Asdewi Dai dan anakda tercinta Fadhilah Linti Olilingo yang telah memberikan motivasi sehingga buku ini dapat terselesaikan. Demikian juga kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga terselesainya buku ini. Penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang tak terhingga.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih yang mendalam kepada *Ideas Publishing* baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan kontribusi demi penerbitan buku ini, semoga Amal Bhakti kita semua akan diridhai, diberkahi dan dirahmati Allah SWT.

Disadari dalam penulisan buku ini, masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini dan semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Gorontalo, Mei 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab 1 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	1
Bab 2 Potensi SDA (Sumber Daya Alam) di Sulawesi Tengah	5
BAB 3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi Wilayah	11
BAB 4 Pengembangan Sektor Industri dalam Proses Pembangunan 17	
A. Argumentasi Industrialisasi.....	19
B. Strategi Industrialisasi	22
C. Klasifikasi Industri	24
BAB 5 Perubahan Struktur Ekonomi dalam Proses Pembangunan	25
A. Perubahan Struktur Penggunaan Tenaga Kerja di Berbagai Sektor Ekonomi	26
B. Perubahan Struktur Produksi.....	28
C. Perubahan Struktur Sektor Industri dalam Perekonomian	32
BAB 6 Perubahan Struktur Perekonomian Negara-Negara Berkembang	39
A. Proses Akumulasi Tabungan dan Pembentukan Modal.....	40
B. Proses Alokasi Sumber-Sumber Daya.....	42
C. Proses Demografis dan Distributif.....	45

D. Perubahan Struktur Ekonomi Wilayah Model Eric C. wang.....	51
BAB 7 Distribusi Pendapatan	37
A. Distribusi Pendapatan Antar Kelompok..	58
B. Distribusi Pendapatan Antar Daerah	65
C. Distribusi Pendapatan antar Sektor	71
Bab 8 Analisis Ketimpangan Antar Sektoral Di Sulawesi Tengah.....	75
A. Analisis Perubahan struktur Melalui Analisis Rowscaler Dan Columnscaler.....	75
B. Hubungan Antara Rowscaler Total dan corumnscaler Total.....	83
C. Implikasi Peruhahan Struktur Terhadap Distribusi Pemakaian Input Antar Sektro Di Sektor Industri Tahun 1995	84
D. Implikasi Pengembangan Sektor industri Terhadap Distribusi Pendapatan Antar Sektor (dilihat Dari Nilai Tambah Bruto Tahun 1990 dan 1995)	88
DAFTAR PUSTAKA.....	93

Bab 1

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Pembangunan ekonomi adalah usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan distribusi pendapatan (E. Wayne Nafziger, 1998:10). Bertitik tolak dari definisi ini maka pembangunan pada hakekatnya adalah usaha yang terus menerus untuk mencapai masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Perwujudan sasaran pembangunan ini antara lain dapat dibuktikan dengan adanya penurunan tingkat kemiskinan, pemerataan pendapatan serta pemerataan pembangunan sampai ke pelosok desa.

Selama kurun waktu Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I) tahun 1969/1970 - 1993/1994 dan dilanjutkan awal PJP II tahun 1993/1994 sebelum diterpa krisis ekonomi dan moneter, pembangunan di Indonesia telah memberikan hasil yang cukup nyata di berbagai bidang.

Di bidang ekonomi, berbagai hasil telah dicapai sesuai rencana, walaupun dalam periode tersebut terdapat tahun-tahun yang sulit, tahun-tahun dengan tingkat pertumbuhan yang lambat. Namun

secara rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi. Selama PJP I tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 6,8% per tahun, jumlah penduduk miskin perlahan-lahan dapat diturunkan dimana pada tahun 1976 berjumlah 54,2 juta jiwa atau sebesar 40,1% dari seluruh penduduk Indonesia dan pada tahun 1993 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 25,9 juta jiwa atau 13,7%.

Sementara itu selama kurun waktu tersebut terjadi perubahan struktural ekonomi Indonesia yang ditandai oleh penurunan sumbangan sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang pada tahun 1969 sebesar 46,9% menjadi hanya tinggal 17,6% pada tahun 1993 (menurut perhitungan harga konstan tahun 1983). Di lain pihak peranan sektor industri pengolahan (*manufacturing*) meningkat dari 8,3% menjadi 21,1% (Dumairy, 1996 : 46).

Walapun sektor industri mencatat perubahan struktur dari sisi produksi, namun tidak disertai dengan peningkatan yang cukup berarti dalam penyerapan tenaga kerja. Sampai dengan tahun 1992 sebagian besar rakyat Indonesia (53,69% dari penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang bekerja) masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sedangkan sektor industri pengolahan hanya menyerap 10,51%. Salah satu penyebab kondisi ini adalah karena hanya tenaga kerja terdidik, terlatih, terampil dan berkeahlian

dalam jumlah kecil yang memperoleh kesempatan kerja di sektor industri (Peter F. Drucker, 1986).

Sementara itu berdasarkan pengamatan dengan menggunakan pendekatan koefisien gini menurut Esmara bahwa:

Keberhasilan pembangunan di atas tidak diikuti dengan perbaikan dalam ketimpangan pendapatan. Malahan pada beberapa kasus, ketimpangna itu makin parah terutama terjadi di daerah perkotaan. Angka indeks gini untuk daerah kota di Indonesia tahun 1970 dan 1976 masing-masing 0,3265 dan 0,3680; sedang untuk daerah pedesaan masing-masing sebesar 0,3387 dan 0,3043. Angka indeks gini untuk daerah kota di Jawa Madura pada tahun 1967, 1970 dan 1976 masing-masing sebesar 0,3006; 0,3319 dan 0,3976, sedangkan untuk daerah pedesaan masing-masing sebesar 0,2567; 0,2977 dan 0,2955 (Esmara, 1977)

Ketimpangan antar kawasan juga terjadi selama kurang lebih 25 tahun pembangunan ekonomi dilakukan di Indonesia. Menurut Kuncoro:

Fakta menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi tetap terpusat di Jawa dan Sumatera. Sebagai contoh untuk sektor manufaktur saja 66% nilai tambah dihasilkan di Jawa, sementara 19% dihasilkan oleh Sumatera.

Dari segi investasi swasta, Jawa menerima sekitar 53%, sementara Sumatera sekitar 31%. Konsentrasi kegiatan ekonomi pada daerah-daerah tertentu akibat penyebaran kekayaan alam, sumber daya manusia, infrastruktur yang tidak merata akan menimbulkan disparitas pendapatan daerah (Kuncoro, 1997:5).

Dari gambaran di atas dapat dikatakan bahwa salah satu persoalan mendasar yang belum terselesaikan selama proses pembangunan dalam kurun waktu di atas adalah ketimpangan pendapatan baik antar individu maupun antar wilayah di Indonesia. Terdapatnya konsentrasi industri pada daerah-daerah tertentu yang memiliki infrastruktur yang sudah mantap seperti Jawa dan Sumatera telah memperburuk ketimpangan pendapatan antar wilayah di Indonesia.

dengan memakai berbagai model ekonometrika, mengemukakan distribusi pendapatan akan mengalami perbaikan seandainya pemerintah ikut campur tangan dalam programnya yang bertujuan untuk mencapai pemerataan. Jikalau tidak maka persoalan ini akan selalu menyertai proses pembangunan.

Bab 2

Potensi SDA (Sumber Daya Alam) di Sulawesi Tengah

Kesadaran akan perlunya penanganan secara serius ketimpangan pendapatan di Indonesia mulai nampak pada akhir tahun 1980an setelah menguatnya isu ketimpangan spasial antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Ketimpangan ini menurut Lucky W. Sondakh merupakan konsekuensi logis dari keterisolasian dan pilihan strategi pembangunan yang lebih berpihak kepada pertumbuhan ketimpangan pemerataan (Prisma, 1994).

Propinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah di KTI akhir-akhir ini telah mendapat perhatian pemerintah dalam percepatan pembangunan. Kebijakan ini didasarkan atas pertimbangan untuk menghindari kesenjangan pembangunan yang semakin melebar dengan KIB. Kesenjangan ini apabila dibiarkan, maka lama-kelamaan akan memicu kecemburuan dari masyarakat di KTI yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya disintegrasi bangsa kita. Selama

kurun waktu 1985-1995 perekonomian Sulawesi Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebesar 7,50% di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 6,80% per tahun. Keberhasilan ini tidak lepas dari kebijakan ekonomi yang diterapkan di Sulawesi Tengah dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi dalam masyarakat.

Berdasarkan data struktur output sektoral Sulawesi Tengah diketahui bahwa peran sektor pertanian masih cukup besar yaitu sebesar 48,23 persen tahun 1990, kemudian meningkat menjadi 50,32 persen tahun 1995. Dengan kata lain sektor pertanian dalam kurun waktu tersebut masih menjadi andalan perekonomian Sulawesi Tengah. Sektor industri juga mencatat peran sebesar 11,14 persen tahun 1990, kemudian meningkat menjadi 11,51 persen tahun 1995. Walaupun perkembangan peran sektor industri relatif kecil, namun memberi harapan di masa depan karena dalam struktur ekspor sektor ini memiliki peran yang cukup signifikan mengalahkan sektor pertanian yaitu 36,36 persen tahun 1990 menjadi 49,94 persen tahun 1995. Sedangkan sektor pertanian dalam kurun waktu tersebut perannya terhadap sektor ekspor mengalami penurunan dari 44,08 persen tahun 1990 menjadi 34,37 persen tahun 1995.

Mengingat besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Sulawesi Tengah, maka dalam jangka panjang sektor industri, khususnya sektor industri

yang berbasis sumber daya alam setempat dapat terus dikembangkan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Sulawesi Tengah meliputi potensi hewani berupa hasil laut seperti ikan, teripang, kulit mutiara dan kulit kerang. Selain itu adapula hasil tambak dan hasil ternak. Sedangkan potensi nabati berupa tanaman perkebunan, kehutanan dan lain-lain.

Selama ini hasil hutan Sulawesi Tengah berupa kayu, rotan dan damar menjadi primadona ekspor daerah ini. Kontribusi jenis komoditi ini cukup besar dalam ekspor Sulawesi Tengah, namun setelah diberlakukannya Inpres Nomor 4 Tahun 1985 tentang pelarangan ekspor dan pengenaan pajak ekspor hasil-hasil hutan dalam bentuk bahan mentah dan bahan setengah jadi, cukup berpengaruh terhadap nilai ekspor Sulawesi Tengah.

Adapun maksud dari Inpres Nomor 4 Tahun 1985 tersebut untuk meningkatkan nilai tambah hasil hutan dan meningkatkan kesempatan kerja di daerah setempat. Pada kenyataannya industri yang mengolah hasil-hasil hutan menjadi barang jadi yang siap ekspor belum dapat berkembang di Sulawesi Tengah. Hal ini tidak lepas karena kurangnya modal dan masih terbatasnya infrastruktur dan kemampuan dari sumber daya yang ada. Akibatnya hasil hutan di daerah ini dikirim ke daerah lain khususnya Surabaya yang memiliki kemampuan untuk mengolah menjadi

barang jadi yang siap di ekspor, sehingga daerah itulah yang dapat menikmati nilai tambah produk tersebut.

Dalam skala nasional penetapan Inpres Nomor 4 Tahun 1985 tersebut mungkin menguntungkan karena adanya kenaikan nilai tambah dalam proses produksi untuk menghasilkan barang jadi, akan tetapi untuk sebagian daerah seperti Sulawesi Tengah, kebijaksanaan tersebut terlihat cukup merugikan karena hasil hutan tidak dapat di ekspor secara langsung ke luar negeri, sementara itu industri pengolahan belum berkembang. Sehingga kebijaksanaan tersebut hanya menguntungkan daerah-daerah yang memiliki kemampuan dalam industri pengolahan hasil hutan, berupa kenaikan nilai tambah yang diperoleh dari proses produksi.

Jikalau peran sektor industri di daerah tidak berkembang, maka dalam jangka panjang nilai tambah yang dihasilkan dari produk alam setempat tetap saja hanya akan dinikmati oleh daerah lain. Akibatnya daerah ini tidak dapat meningkatkan pendapatannya secara signifikan, sehingga daerah ini tidak akan memiliki kemandirian khususnya dalam pembiayaan pembangunan.

Analisis peran sektor industri akan dititiberatkan pada perannya terhadap pendapatan dan penciptaan lapangan kerja, permintaan akhir, perubahan struktural, keterkaitan antar sektor serta daya dorong dan daya tarik. Analisis distribusi pemakaian input dibutuhkan untuk

mengidentifikasi perannya terhadap pemanfaatan input lokal. Sedangkan analisis ketimpangan sektoral akan mengungkap kinerja pengembangan sektor ekonomi Sulawesi Tengah khususnya dalam menghasilkan nilai tambah.

Wilayah dalam ini diartikan sebagai daerah otonom berdasarkan wilayah administrasi seperti Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya yang merupakan bagian dari Wilayah Pembangunan Utama (WPU) dan Wilayah Pembangunan (WP) di Indonesia antara lain dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam mengkoordinasikan pembangunan pada masing-masing Propinsi sejak Pelita I sampai dengan Pelita selanjutnya. Dalam hubungan itu, Sugeng Budiharsono (1989) mengemukakan bahwa tahapan pembangunan Indonesia dewasa ini, unsur pembangunan wilayah seyogyanya mendapat perhatian dan tempat yang wajar terutama bila pembangunan ditekankan pada strategi pemerataan.

Studi ekonomi wilayah menurut Iwan Jaya Azis (1994:150) berkaitan dengan pendapatan wilayah, arus komoditas (*supply and demand*), lokasi industri, basis ekonomi, multiplier dan lain sebagainya. Dalam kaitan ini pendekatan untuk mengungkapkan besaran variabel serta kaitannya dengan variabel lainnya antara lain dapat dilakukan melalui analisis *shift share* yang menganalisis komponen pertumbuhan wilayah,

Indeks Williamson tentang analisis kesenjangan wilayah, analisis lokasi industri, analisis ekonomi basis dan analisis input-output.

Menurut Sugeng Budiharsono (1989:114) model input-output banyak diterapkan di dalam perencanaan pengembangan wilayah karena model ini memiliki kemampuan dalam : 1) Mengestimasi ketergantungan struktural antara berbagai sektor yang menyusun perekonomian suatu wilayah secara konsisten, 2) Mampu meramalkan dampak langsung dan tidak langsung dari kegiatan ekonomi yang direncanakan, dan 3) Mampu secara konsisten meramalkan kecenderungan pertumbuhan perekonomian sekurang-kurangnya untuk waktu 3 sampai 5 tahun.

Model input-output sebagai alat analisis dalam ilmu ekonomi cukup berkembang selain dapat mengidentifikasi kontribusi sektoral, efek multiplier, keterkaitan sektoral, daya dorong dan daya tarik juga dapat mengidentifikasi perubahan struktur melalui *Indeks Rowscaler and Columnscaler*. Model perubahan struktur dikembangkan oleh Hoover (1975), Bon (1986), Chen dan Rose (1991) dan Bon dan Bing (1993), kemudian dimodifikasi oleh Wang (1997). Salah satu keunggulan model ini adalah dapat mengidentifikasi indeks pemakaian input antar sektoral sehingga menggambarkan distribusi pemakaian input yang timpang atau tidak antar sektor ekonomi, khususnya dalam pemanfaatan input lokal.

BAB 3

Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi Wilayah

Istilah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi seringkali masih menjadi kontroversi dari para ahli ekonomi. Sebagian menyatakan bahwa pertumbuhan sama dengan pembangunan ekonomi, sedangkan sebagian lain menyatakan berbeda. Diantara yang berpandangan bahwa kedua kata tersebut sama adalah Jhiangan yang menyatakan :

“Economic growth or development be defined as an increase over time per capita output of material goods”, (M.L Jhiangan, 1975:132)

Berdasarkan pernyataan di atas diperoleh suatu gambaran bahwa *“economic growth”* dan *“economic development”* dianggap sama dimana ukuran keberhasilan yang digunakan adalah kenaikan output per kapita barang-barang material. Jika output per kapita meningkat, maka pembangunan atau pertumbuhan ekonomi sudah terwujud. Hal ini disinyalir juga oleh Mudrajad Kuncoro yang menyatakan bahwa sepanjang

dasawarsa 1950-an pembangunan ekonomi diidentikan dengan pertumbuhan ekonomi, dimana hal ini telah membawa implikasi terhadap semua kebijakan pembangunan ekonomi yang senantiasa diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Mudrajatd Kuncoro, 1997:8).

Penekanan terhadap pentingnya pertumbuhan ekonomi yang ditandai oleh kenaikan output per kapita juga didukung oleh banyak ahli ekonomi. Salah satu diantaranya adalah Sadono Sukirno. Sadono membatasi definisi pembangunan ekonomi sebagai :

Suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sadono Sukirno, 1985:12)

Dari pengertian ini, pembangunan ekonomi memiliki tiga sifat penting yaitu (1) suatu proses, yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus menerus, (2) usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan per kapita, dan (3) kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.

Kindleberger menganggap kedua pengertian tersebut justru berbeda dan menyatakan bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sering dipakai secara sinonim, namun bila kedua istilah ini digunakan sering diadakan perbedaan.

Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila terdapat lebih banyak output, sedangkan pembangunan

ekonomi diartikan tidak hanya terdapat lebih banyak output, tetapi juga terdapat dalam pengaturan kelembagaan dan teknik dalam menghasilkan output.

Pertumbuhan dapat meliputi penggunaan input secara lebih efisien atau adanya kenaikan output per satuan input. Pembangunan ekonomi mempunyai jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, karena menyangkut perubahan dalam output dan alokasi input per sektor Kindleberger, 1976:55 dalam Fachrudin (1992:27)

Dalam tahun 1990 an pengertian pembangunan ekonomi semakin luas dengan memasukan unsur distribusi pendapatan dan perubahan struktur ekonomi, selain adanya pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang berpendapat demikian adalah E. Wayne Nafziger yang menyatakan :

Pembangunan ekonomi adalah usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan distribusi pendapatan (E. Wayne Nafziger, 1998:10).

Dari pengertian ini jelas pertumbuhan ekonomi hanya merupakan bagian dari usaha pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, bahwa tercapainya pembangunan ekonomi tidak bisa diukur semata-mata hanya dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi saja.

Pembangunan wilayah adalah bagian integral dalam pembangunan nasional. Menurut Johara T. Jayadinata :

Wilayah (region) dalam pengertian geografi merupakan kesatuan alam yaitu alam yang serba sama atau homogeny atau uniform, dan kesatuan manusia yaitu masyarakat serta kebudayaannya yang serba sama yang mempunyai ciri khas, sehingga wilayah tersebut dapat dibedakan dari wilayah yang lain. Wilayah geografi dapat mengandung wilayah geologi dan wilayah vegetasi. Wilayah geografi itu disebut wilayah formal. Johara T. Jayadinata (1992:9).

Di samping istilah wilayah formal, juga dikenal wilayah informal seperti yang dikemukakan oleh Lutfi I. Nasution dalam Senen, yaitu sebagai suatu unit geografis dengan batar-batas tertentu dan bagian-bagian wilayah tersebut saling tergantung secara fungsional, yang terdiri dari pusat (*centre*) dan daerah belakangnya (*hinterland*). Pusat mempunyai fungsi sebagai berikut : a) pusat pemukiman/penduduk, b) pemusatan kegiatan industri, c) tempat pemasaran bahan mentah, d) tempat pemusatan sarana pelayanan. Daerah belakangnya mempunyai fungsi sebagai berikut : a) tempat menghasilkan bahan mentah, b) tempat pemasaran hasil produksi, dan c) sumber tenaga kerja. Dengan demikian antar pusat dan daerah

belakangnya saling berinteraksi membentuk suatu wilayah fungsional.

Untuk keperluan sehari-hari wilayah fungsional sering juga disebut sebagai wilayah administrasi yang mempunyai batas-batas wilayah yang ditentukan berdasarkan satuan administrasi formal dan biasanya di bawah pimpinan pemerintahan formal. Demikian pula dalam hubungannya dengan analisis ekonomi pembangunan wilayah, diperlukan pengertian wilayah fungsional yang juga dapat disebut sebagai wilayah administrasi.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sadono Sukirno, bahwa dalam prakteknya pengertian wilayah yang dihubungkan dengan perencanaan wilayah adalah wilayah administrasi. Hal ini disebabkan oleh dalam melaksanakan berbagai kebijaksanaan pembangunan wilayah diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai badan pemerintah yang mempunyai batas-batas kewenangan administrasi. Lebih mudah dianalisis berdasarkan pengumpulan data di berbagai daerah.

BAB 4

Pengembangan Sektor Industri dalam Proses Pembangunan

Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Produk-produk industri selalu memiliki dasar tukar (*terms of trade*) yang tinggi atau lebih menguntungkan serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan produk-produk sektor lain. Hal ini disebabkan karena sektor industri memiliki variasi produk yang sangat beragam dan mampu memberikan manfaat marginal yang tinggi kepada pemakainya.

Pelaku bisnis baik produsen, penyalur, pedagang maupun investor umumnya lebih suka berkecimpung dalam bidang industri karena sektor ini memberikan margin keuntungan yang lebih menarik. Selain daripada itu bidang ini lebih diminati karena proses produksi serta penanganan produknya lebih bisa dikendalikan oleh manusia, tidak terlalu bergantung pada alam misalnya pengaruh musim atau keadaan cuaca.

Karena kelebihan-kelebihan sektor industri sebagaimana yang dipaparkan tadi, maka

industrialisasi dianggap sebagai obat mujarab untuk mengatasi masalah pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Kebijakan yang ditempuh seringkali terkesan dipaksakan dalam arti hanya sekedar meniru pola kebijaksanaan pembangunan di negara-negara maju tanpa memperhatikan keadaan dan kondisi lingkungan yang ada seperti masalah ketersediaan bahan mentah, ketersediaan teknologi, kecakapan tenaga kerja, kecukupan modal dan lain sebagainya. Akibatnya kebanyakan negara berkembang yang mengikuti formula industrialisasi yang ditandakan para ahli ekonomi dari negara maju beranggapan bahwa pengembangan sektor industri merupakan obat yang sangat ampuh untuk memperbaiki keadaan mereka.

Sedikit sekali negara-negara berkembang yang menyadari bahwa usaha untuk memajukan dan memperluas sektor industri haruslah sejajar dengan pembangunan sektor-sektor lain terutama sektor pertanian. Pada hakekatnya kedua sektor tersebut memiliki keterkaitan yang erat. Sektor pertanian yang lebih maju dibutuhkan oleh sektor industri, baik sebagai penyedia input maupun sebagai pasar produk-produk industri. Setiap peningkatan daya beli petani akan merupakan rangsangan bagi pembangunan sektor industri pula. Jadi, kelancaran program industrialisasi sebetulnya tergantung pula pada perbaikan-perbaikan di sektor lain, dan seberapa jauh perbaikan-perbaikan yang dilakukan

mampu mengarahkan dan bertindak sebagai pendorong bagi munculnya industri-industri baru.

Dengan cara demikianlah kebijaksanaan yang ditempuh akan dapat mewujudkan mekanisme saling dukung antar sektor. Dalam dialektika-sektoral pertanian-pertanian itu berarti bahwa harus tercipta suatu keadaan dengan mana surplus tenaga kerja di sektor pertanian dapat tertarik ke sektor industri agar sektor pertanian menjadi lebih efisien, sehingga dapat menjadi pasar yang lebih efektif bagi sektor industri.

A. Argumentasi Industrialisasi

Dalam implementasinya ada empat argumentasi atau basis teori yang melandasi suatu kebijaksanaan industrialisasi. Teori-teori dimaksud adalah argumentasi keunggulan komparatif, argumentasi keterkaitan industrial, argumentasi penciptaan kesempatan kerja dan argumentasi loncatan teknologi.

Pola pengembangan sektor industri di suatu negara sangat dipengaruhi oleh argumentasi yang melandasinya. Negara-negara yang menganut basis teori keunggulan komparatif (*comparative advantage*) akan mengembangkan sub sektor atau jenis-jenis industri yang memiliki keunggulan komparatif bagi negerinya. Negeri yang bertolak dari argumentasi keterkaitan industrialisasi (*industrial linkage*) akan lebih mengutamakan pengembangan bidang-bidang industri yang paling luas mengait

perkembangan bidang-bidang kegiatan atau sektor-sektor ekonomi lain.

Negara yang industrialisasinya dilandasi argumentasi penciptaan kesempatan kerja niscaya akan lebih memprioritaskan pengembangan industri-industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Jenis industri yang dimajukannya bertumpu pada industri-industri yang relatif padat karya dan industri-industri kecil. Adapun negeri yang menganut argumentasi loncatan teknologi (*technology jump*) percaya bahwa industri-industri yang menggunakan teknologi tinggi (*hi-tech*) akan memberikan nilai tambah yang sangat besar, diiringi dengan kemajuan teknologi bagi industri-industri dan sektor-sektor lain.

Masing-masing argumentasi atau teori tadi memiliki kelebihan dan kekurangan. Teori keunggulan komparatif misalnya, kelebihanannya adalah dalam hal efisiensi alokasi sumber daya. Dengan mengutamakan pengembangan industri-industri yang secara komparatif unggul, sumber daya ekonomi akan teralokasi ke penggunaan-penggunaan yang paling menguntungkan. Kelemahannya terletak pada pendekatannya yang menyandarkannya pada sisi produksi.

Produk dari industri yang memiliki keunggulan komparatif boleh jadi adalah barang yang kurang diminati oleh konsumen sehingga meskipun efisien di produksi mungkin sulit dipasarkan. Pendekatan produksi itu bersifat statis

pula sehingga tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan pola atau dinamika konsumsi.

Teori keterkaitan industrial sangat peduli akan kemungkinan-kemungkinan berkembangnya sektor-sektor lain. Bertolak dari keterkaitan itu, baik kaitan ke depan (*forward linkage*) maupun kaitan ke belakang (*backward linkage*), sektor industri diharapkan bisa berperan sebagai motor yang menggerakkan perkembangan sektor lain.

Kelamahan argumentasi ini kurang menghiraukan pertimbangan efisiensi. Industri yang memiliki kaitan luas, sehingga diprioritaskan untuk dikembangkan, boleh jadi adalah industri-industri yang memerlukan modal besar atau sangat menyerap devisa, atau industri yang justru tidak memiliki keunggulan komparatif.

Argumentasi penciptaan kesempatan kerja unggul karena titik tolaknya yang sangat manusiawi. Selaras dengan paradigma yang menempatkan manusia sebagai suyek (bukan obyek) pembangunan, argumentasi ini sangat populis dan cocok bagi negara-negara berkembang yang memiliki penduduk dalam jumlah besar. Namun industri-industri yang dikembangkan berdasarkan penciptaan kesempatan kerja mungkin saja industri-industri yang tidak memiliki kaitan luas dengan sektor-sektor lain, sehingga tidak dapat berperan sebagai sektor yang memimpin (*leading*

sector). Inilah antara lain kelemahan argumentasi ini.

Yang terakhir, argumentasi loncatan teknologi merupakan pandangan baru dalam jajaran teori industrialisasi. Kekuatan argumentasi ini terletak pada optimism teknologinya, bahwa pengembangan industri berteknologi tinggi akan dengan sendirinya memacu kemajuan teknologi di sektor-sektor lain. Sayangnya, argumentasi ini bersifat tidak peduli biaya, tidak menghiraukan ketersediaan modal sehingga potensial bersifat boros devisa. Teori ini, ironisnya juga kurang peduli akan kesiapan kultural masyarakat dalam menghadapi loncatan teknologi.

B. Strategi Industrialisasi

Jika dalam implementasi kebijaksanaan terdapat empat argumentasi, maka dalam strategi industrialisasi dikenal dua macam pola. Kedua pola dimaksud ialah substitusi impor (*import substitution*) dan promosi ekspor (*export promotion*). Sebagaimana dalam hal argumentasi-argumentasi tadi, masing-masing strategi ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Pola substitusi impor, dikenal juga dengan istilah strategi “orientasi ke dalam” atau *inward looking strategy* ialah suatu strategi industrialisasi yang mengutamakan pengembangan jenis-jenis industri untuk menggantikan kebutuhan akan impor produk-produk sejenis. Pada tahap awal,

yang dikembangkan biasanya adalah industri-industri ringan yang menghasilkan barang-barang konsumtif. Untuk memungkinkannya tumbuh besar, industri-industri yang masih bayi (*infant industry*) ini biasanya sangat dilindungi oleh pemerintah dari persaingan yang tidak setara dari produk-produk impor. Akan tetapi proteksi itu, walaupun bisa menumbuhkannya menjadi besar, acapkali membuat industri yang bersangkutan tidak kunjung dewasa, melainkan justru menjadikannya manja.

Sedangkan strategi promosi ekspor, kadang-kadang dijuluki strategi “orientasi ke luar” atau *outward looking strategy*, ialah strategi industrialisasi yang mengutamakan pengembangan jenis industri-industri yang menghasilkan produk-produk untuk di ekspor. Strategi promosi ekspor biasanya ditempuh sebagai kelanjutan dari strategi substitusi impor. Namun hal ini bukanlah sebuah keharusan. Dalam proses industrialisasi bisa saja strategi promosi ekspor dijalankan tanpa harus didahului substitusi impor. Hal ini bergantung antara lain pada potensi relatif pasar dalam negeri di negara yang bersangkutan.

Di Indonesia, sebagaimana halnya di banyak negara berkembang, sektor industri disiapkan untuk mampu menjadi motor yang menggerakkan kemajuan sektor-sektor lain, diharapkan bisa menjadi sektor yang memimpin (*the leading sector*). Itulah sebabnya industrialisasi senantiasa mewarnai

perjalanan pembangunan ekonomi. Ditinjau dari sudut pola pengembangannya, industrialisasi kita bermula dari strategi substitusi impor. Kini pola itu beralih ke strategi promosi ekspor. Sedangkan dilihat dari implementasinya, kebijaksanaan pengembangan industri di Indonesia didominasi oleh pemikiran-pemikiran keterkaitan industrial. Namun, tercatat sejak Repelita V, kebijaksanaan pengembangan industri yang berlandaskan argumentasi loncatan teknologi (*hi-tech*) tampaknya kian menggejala.

C. Klasifikasi Industri

Industri dapat digolongkan berdasarkan beberapa sudut tinjauan atau pendekatan. Di Indonesia, industri digolongkan antara lain berdasarkan kelompok komoditas, berdasarkan skala usaha dan berdasarkan hubungan arus produknya. Penggolongan yang paling universal ialah berdasarkan Baku Internasional Klasifikasi Industri (*international standard of industrial classification, ISIC*). Penggolongan menurut ISIC ini didasarkan atas pendekatan kelompok komoditas, yang secara garis besar dibedakan menjadi 9 golongan. Penggolongan berdasarkan ISIC ini terinci lebih lanjut sampai dengan kode atau sandi enam digit.

BAB 5

Perubahan Struktur Ekonomi dalam Proses Pembangunan

Pembangunan ekonomi selain ditandai oleh meningkatnya pendapatan per kapita dalam jangka panjang juga ditandai oleh perubahan struktur ekonomi. Banyak ahli ekonomi yang telah membahas perubahan struktur ekonomi di suatu negara antara lain Fisher (1935) dan Clark (1940) yang khusus mengulas perubahan struktur penggunaan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi. Kuznet (1960) yang menyelidiki baik perubahan struktur penggunaan tenaga kerja dan struktur produksi. Sedangkan Chenery (1981) dan Syrquin (1988) yang telah mengembangkan model perubahan struktur ekonomi dengan memasukan variabel pendapatan, penduduk, ekspor dan pembentukan modal tetap, (dalam, Sadono Sukirno 1985:75

A. Perubahan Struktur Penggunaan Tenaga Kerja di Berbagai Sektor Ekonomi

Struktur penggunaan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi akan mengalami perubahan seiring dengan dilakukannya pembangunan ekonomi. Transformasi struktur ketenagakerjaan dapat dideteksi dengan melihat perkembangan peran masing-masing sektor dalam menyerap tenaga kerja. Menurut Fisher 1935, pertumbuhan ekonomi disertai dengan peralihan dan pergeseran permintaan secara berangsur-angsur dari kegiatan sektor produksi primer (pertanian, kehutanan, perikanan dan pertambangan) ke sektor produksi sekunder (industri manufaktur dan konstruksi), dan ke sektor tersier (jasa) yang mengakibatkan perubahan dalam struktur melalui pergeseran kesempatan kerja dan alokasi dana.

Bukti kuantitatif yang mendukung penjelasan Fisher tersebut dikemukakan oleh Clark 1949, dalam Sadono Sukirno (1985: 127) dengan menggunakan data *cross section* dari beberapa negara, Clark menyusun struktur kesempatan kerja menurut sektor produksi (sektor primer, sekunder dan tersier) dan tingkat pendapatan per kapita. Hasilnya sesuai dengan penjelasan Fisher, bahwa makin tinggi pendapatan per kapita suatu negara, makin kecil peranan sektor primer dalam menyediakan kesempatan kerja. Akan tetapi sebaliknya, sektor sekunder dan tersier makin

penting peranannya dalam menyediakan kesempatan kerja.

Sejalan dengan Clark, Kuznets (1966) dalam Sadono Sukirno 1985:129 juga mengadakan penyelidikan tentang perubahan struktur tenaga kerja pada berbagai negara. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, Kuznets telah mengumpulkan data dari 14 negara dalam kurun waktu 1841 - 1958. Negara-negara yang diobservasi adalah Inggris, Perancis, Belgia, Swiss, Belanda, Denmark, Norwegia, Swedia, Italia, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang dan Rusia.

Berdasarkan data yang dikumpulkan tersebut Kuznets menarik beberapa kesimpulan tentang corak perubahan struktur tenaga kerja pada berbagai sektor ekonomi sebagai berikut :

1. Umumnya peranan sektor pertanian dalam menyediakan kesempatan kerja menurun termasuk di Australia. Pada permulaan masa observasi, di beberapa negara (Amerika Serikat, Jepang dan Rusia) peranan sektor pertanian dalam menyediakan kesempatan kerja mencapai 75 persen dari seluruh tenaga kerja. Pada akhir masa observasi, di kebanyakan negara perannya di bawah 20 persen. Ini berarti bahwa peranannya mengalami penurunan sebesar kurang lebih 20 hingga 50 persen.
2. Peranan sektor industri dalam menyediakan kesempatan kerja meningkat walaupun

kenaikannya relatif kecil. Peningkatan yang cukup berarti yaitu sebesar atau bahkan lebih besar dari sumbangan sektor ini terhadap produksi nasional terjadi pada negara Inggris, Swedia, Jepang dan Rusia.

3. Peranan sektor jasa dalam menyediakan kesempatan kerja tidak mengalami banyak perubahan di Inggris, Belgia, Belanda, Swedia dan Australia. Tetapi di negara-negara lainnya,, peranannya mengalami kenaikan relatif yang sangat besar sekali seperti yang terjadi di Swis, Denmark, Norwegia, Italia, Amerika Serikat, Kanada, Jepang dan Rusia.

Kalau dibandingkan peranan sektor jasa dalam menghasilkan produksi nasional, maka umumnya perannya dalam menyediakan kesempatan kerja lebih besar.

B. Perubahan Struktur Produksi

Perubahan struktur produksi pada hakekatnya menunjukkan selama pertumbuhan ekonomi berlangsung terjadi perbedaan dalam laju pertumbuhan produksi tiap-tiap sektor. Kenaikan produksi suatu sektor hanya mungkin terjadi kalau ada peningkatan dalam kuantitas dan kualitas faktor produksi yang digunakan dan juga karena adanya perkembangan teknologi pada sektor tersebut. Implikasinya selama pertumbuhan

ekonomi berlangsung, alokasi sumberdaya ke berbagai sektor mengalami perubahan.

Bukti empiris yang mendukung penjelasan ini dapat dilihat dari hasil penyelidikan Kuznets (1966) yang mengumpulkan data tentang sumbangan berbagai sektor kepada produksi nasional di tiga belas negara yaitu Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Denmark, Norwegia, Swedia, Italia, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang dan Rusia dalam kurun waktu tahun 1801 - 1963.

Berdasarkan data yang dikumpulkan itu Kuznets menarik kesimpulan tentang corak perubahan struktur produksi yaitu :

1. Sumbangan sektor pertanian terhadap produksi nasional telah menurun di dua belas negara dari tiga belas negara yang diobservasi. Secara umum pada taraf permulaan pembangunan ekonomi, peranan sektor pertanian dalam menghasilkan produksi nasional hanya mencapai 10 -20 persen. Satu-satunya pengecualian dari hasil observasi ini adalah Australia yang dalam delapan dasawarsa peranan sektor pertanian bertambah besar, walaupun dalam jangka masa itu kemajuan ekonominya terus-menerus berlangsung.
2. Untuk dua belas negara peranan sektor industri dalam menghasilkan produk nasional meningkat. Pada tahun awal observasi sumbangan sektor tersebut

berkisar antara 20 - 30 persen dari seluruh produksi nasional, sedangkan pada tahun akhir observasi, peranannya meningkat menjadi 40 - 50 persen. 3) Sektor jasa sumbangannya dalam menciptakan produksi nasional tidak mengalami perubahan yang berarti dan perubahan itu tidak konsisten sifatnya. Di Swedia dan Australia peranannya menurun, di Kanada dan Jepang peranannya meningkat dan pada kebanyakan negara perubahan tidak begitu berarti.

Perubahan struktur ekonomi seperti yang digambarkan di atas berarti bahwa a) Sektor pertanian produksinya mengalami perkembangan yang lebih lambat dari perkembangan produksi nasional. b) Tingkat pertumbuhan produksi sektor industri adalah lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan produksi nasional. c) Tingkat perkembangan sektor jasa relatif sama dengan tingkat perkembangan produksi nasional.

Menurut Kuznets (1966), dalam Sadono Sukirno (1985:79) perubahan struktur ekonomi yang demikian coraknya disebabkan oleh :

1. Sifat manusia dalam pola konsumsinya, yaitu apabila pendapatan naik, elastisitas permintaan untuk bahan makanan yang disebabkan oleh perubahan pendapatan (*income elasticity of demand for food*) adalah

rendah (<1) yaitu sekitar 0,6 sampai 0,9 dan untuk negara-negara maju mendekati nol, yaitu 0,2 sampai 0,3 (Mellor dalam Sugeng Budiharsono, 1996). Sedangkan elastisitas permintaan terhadap bukan makanan, termasuk hasil industri dan jasa lebih besar dari satu. Berdasarkan penyelidikan elastisitas pendapatan terhadap barang-barang industri berkisar 1,11 sampai 1,90 (Henrrick dan Kindleberger dalam Sugeng Budiharsono, 1989). Perilaku permintaan masyarakat seperti itu dikenal dengan hukum Engel yang intinya adalah semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, semakin sedikit persentase pendapatan yang digunakan untuk membeli makanan, sebaliknya persentase pendapat yang digunakan untuk membeli barang bukan makanan menjadi bertambah besar.

2. Adanya perubahan teknologi yang terus menerus berlangsung. Perubahan teknologi ini akan meningkatkan produksi sehingga dapat memperluas pasar khususnya produksi bukan makanan yang pada gilirannya mengakibatkan elastisitas permintaan jangka panjang atas hasil pertanian bukan bahan makanan terhadap perubahan pendapatan relatif rendah bila dibandingkan dengan permintaan terhadap hasil bukan pertanian. 3) negara-negara

yang tergolong maju telah mampu menikmati keuntungan komparatif (*comparative advantage*) dalam memproduksi barang-barang industri. Sementara itu, negara-negara berkembang menikmati keuntungan komparatif dalam memproduksi hasil-hasil pertanian. Adanya perdagangan diantara dua kelompok negara tersebut, telah memberikan peluang besar bagi sektor industri dalam menghasilkan produksi nasional.

C. Perubahan Struktur Sektor Industri dalam Perekonomian

Untuk lebih mengetahui perubahan struktur yang terjadi pada sektor industri Kuznets menganalisis perubahan peranan berbagai sub sektor industri dalam perekonomian. Dalam analisisnya Kuznets membedakan sektor industri menjadi 4 sub sektor yaitu pertambangan, industri pengolahan, industri bangunan dan perhubungan dan pengangkutan.

Dengan menggunakan sampel beberapa negara Kuznets menyimpulkan beberapa sifat sub sektor industri dalam menghasilkan produksi nasional dan menciptakan kesempatan kerja sebagai berikut:

1. Sub sektor pertambangan dan industri bangunan umumnya memiliki peranan yang kecil selama proses pembangunan berlangsung. Hasil observasi di kebanyakan

negara membuktikan bahwa peranan dari kedua sub sektor ini dalam menciptakan produksi sektor industri dan manampung tenaga kerja menjadi bertambah kecil apabila tingkat pembangunan ekonomi bertambah besar.

2. Sub sektor industri pengolahan yang meliputi juga industri tenaga (air dan listrik) peranannya dalam menciptakan produksi sektor industri dan menampung tenaga kerja pada umumnya bertambah besar seiring dengan proses pembangunan.
3. Perubahan peranan sub sektor perhubungan dan pengangkutan dalam menciptakan produksi sektor industri dan menampung tenaga kerja tidak menunjukkan pola yang seragam. Peranannya dalam menciptakan produksi sektor industri menurun di dua negara yaitu di Inggris dan Amerika Serikat dan tetap di suatu negara yaitu Swedia. Di tiga negara lainnya yaitu Norwegia, Italia dan Australia perannya meningkat.
4. Untuk negara Amerika dan Australia dalam analisisnya selain menggunakan data berdasarkan harga berlaku juga menggunakan data berdasarkan harga konstan.

Hasilnya terjadi peningkatan yang cukup berarti peran sektor perhubungan dan angkutan dalam produk sektor industri dari 14 persen tahun 1869-1878 menjadi 25 persen tahun 1939-1948 di Amerika Serikat, sedangkan di Australia peran sektor ini meningkat dari 4 persen tahun 1961 - 1965 menjadi 24 persen pada tahun 1934 - 1938.

Analisis perubahan peranan sub sektor industri selain dilakukan Kuznets juga dilakukan Chennery. Bedanya adalah analisis Chennery menggunakan data *cross section* yaitu data di berbagai negara dalam suatu masa tertentu dan bukan dengan mengumpulkan data perubahan peranan berbagai sektor dalam perekonomian dari masa ke masa sebagaimana yang dilakukan Kuznets.

Dengan mengambil sampel 51 negara pada tahun 1950-1956 Chennery menggunakan suatu model yang didasarkan pada hipotesis bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan peranan suatu sektor dalam menciptakan produksi nasional tergantung pada tingkat pendapatan per kapita dan jumlah penduduk negara yang bersangkutan.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Chennery mengenai peranan berbagai sektor dalam menciptakan produksi nasional dalam proses pembangunan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan sektor industri dalam menciptakan produksi nasional meningkat dari 17 persen

dari produksi nasional pada tingkat pendapatan per kapita US \$ 100 menjadi 38 persen pada tingkat pendapatan per kapita sebesar US \$ 1000. Khusus untuk industri pengolahan, peranannya meningkat dari 12 persen menjadi 33 persen pada tingkat pendapatan di atas.

2. Peranan sektor jasa tidak mengalami perubahan yaitu tetap 38 persen selama terjadi peningkatan pendapatan per kapita dari US \$ 100 menjadi US \$ 1000.

Selanjutnya Chennery secara lebih detail menunjukkan perubahan peranan sub sektor industri dalam pengolahan dalam proses pembangunan. Untuk itu dia membagi industri pengolahan menjadi tiga kelompok, yaitu industri barang-barang konsumsi, industri bahan baku dan industri barang modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pada tingkat pendapatan per kapita US \$ 100 peranan sektor industri dalam perekonomian sebesar 68 persen berasal dari industri barang konsumsi, 20 persen berasal dari industri bahan baku, dan 12 persen berasal dari industri barang modal.
2. Pada tingkat pendapatan per kapita US \$ 600 komposisi peran sektor industri berubah menjadi 43 persen berasal dari industri barang konsumsi, 35 persen berasal dari industri bahan baku dan peranan industri

barang modal relatif tidak mengalami perubahan.

Hasil penelitian Chennery di atas mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu penelitian telah terjadi peningkatan sub sektor industri pengolahan yang cukup besar dibandingkan dengan peningkatan pendapatan per kapita. Menurut Chennery ada tiga faktor penyebab terjadinya hal ini, yaitu : 50 persen karena adanya substitusi impor, 20 persen karena adanya perkembangan permintaan barang-barang jadi (*final goods*), dan 10 persen karena adanya permintaan terhadap barang-barang setengah jadi (*intermediate goods*). Faktor-faktor lainnya seperti perubahan harga, kesalahan penaksiran dan lain-lain menyumbang sebesar 18 persen dari industrialisasi.

Dari gambaran di atas Chennery mengambil kesimpulan bahwa faktor terpenting yang menimbulkan industrialisasi adalah karena adanya substitusi impor dan bukan karena perubahan dalam komposisi permintaan sebagai akibat dari pendapatan yang bertambah. Mungkin hal inilah yang telah mengilhami kebijakan pengembangan industri di Indonesia sejak tahun 1970 an yang menerapkan strategi substitusi impor yang dikenal dengan istilah orientasi ke dalam atau *inward looking* dalam pengembangan industrinya.

Menurut Arif dan Hill dalam Thee Kian Wee, ada dua alasan yang menjadi pembenar kebijakan ini,

1. Strategi substitusi impor yang dapat bersandar pada pasar dalam negeri yang dikenal dengan baik dan mudah ditembus daripada pasar ekspor yang tidak dikenal.
2. Strategi ini juga dapat memberi kesempatan kepada negara yang bersangkutan untuk menguasai keterampilan teknis dan manajerial yang perlu dan memperoleh pengalaman dalam produksi dan pemasaran di samping menghemat devisa yang langka (Thee Kian Wie, 1980:29).

Setelah diperolehnya kebijakan strategi substitusi impor ini telah berdampak pada pertumbuhan sektor industri Indonesia khususnya industri pengolahan yang tumbuh rata-rata 12 persen per tahun, suatu tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi diantara negara-negara Asia (The Kian Wie, 1980:5). Demikian juga terjadi penguatan struktur produksi dan penyerapan tenaga kerja khususnya pada industri tekstil, tembakau yang mencakup industri kretek yang besar, industri kayu, produk pangan, kimia dasar dan lain-lain.

Keberhasilan ini cukup menggembirakan namun dalam jangka panjang cukup merisaukan. Setidaknya hal ini pernah diperingatkan oleh begawan ekonomi Indonesia, Soemitro Djoyohadikusumo yang menyatakan bahwa

kebijakan strategi substitusi impor yang dibarengi dengan tingkat proteksi yang tinggi, pada umumnya gagal menumbuhkan sektor industri yang mampu bersaing di pasar internasional. Hal ini antara lain disebabkan proteksi yang berlebihan tidak akan mendewasakan pertumbuhan industri, malah sebaliknya yang terjadi industri yang tidak efisien tetap dibiarkan tumbuh berlindung di balik kebijakan tersebut.

BAB 6

Perubahan Struktur Perekonomian Negara-Negara Berkembang

Pada tahun 1975 Chenenery dan Syrquin secara bersama-sama melakukan analisis tentang perubahan perekonomian negara-negara berkembang yang pada intinya menunjukkan corak dari sepuluh jenis perubahan dalam struktur perekonomian selama proses pembangunan berlangsung. Perubahan-perubahan tersebut dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi yang dipandang sebagai perubahan dalam proses akumulasi.
2. Perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi yang dipandang sebagai perubahan dalam alokasi sumber-sumber daya, dan
3. Perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi yang dipandang sebagai perubahan dalam proses demografis dan distributif.

Kegiatan-kegiatan ekonomi yang termasuk sebagai proses akumulasi adalah pembentukan modal atau investasi, pendapatan pemerintah dan kegiatan penyediaan pendidikan kepada masyarakat. Yang tergolong sebagai alokasi sumber-sumber daya adalah struktur permintaan domestik (pengeluaran-pengeluaran masyarakat atau produksi dalam negeri) struktur produksi dan struktur perdagangan. Yang tergolong dalam proses demografis dan distributif adalah alokasi tenaga kerja dalam berbagai sektor, urbanisasi, tingkat kelahiran, dan kematian serta distribusi pendapatan. Dengan menggunakan data yang di observasi pada 101 negara dalam kurun waktu 1950 - 1970 Chennery dan Syrquin menemukan pola perubahan struktural yang terjadi dalam proses pembangunan.

A. Proses Akumulasi Tabungan dan Pembentukan Modal

Tingkat tabungan dan pembentukan modal mengalami peningkatan yang cukup besar selama proses pembangunan. Pada tingkat pendapatan per kapita \$ 100 peran tabungan 13,5 persen meningkat menjadi 22,3 persen pada saat pendapatan per kapita \$ 1000. Sementara itu pembentukan modal juga mengalami peningkatan dari 15,8 persen pada saat pendapatan per kapita \$ 100 menjadi 24 persen pada tingkat pendapatan per kapita menjadi \$ 1000.

Keadaan di mana tabungan dan pembentukan modal mengalami perubahan ke arah yang sama merupakan suatu hal yang wajar, karena dana yang digunakan untuk pembentukan modal berasal dari tabungan. Dengan demikian makin besar tingkat tabungan, biasanya makin besar pula tingkat pembentukan modal. Selama proses pembangunan berlangsung biasanya pembentukan modal lebih besar dari tabungan. Hal ini antara lain disebabkan oleh aliran modal dari luar negeri, walaupun jangka panjang bertendensi menurun. Dalam kasus ini jumlah penanaman modal berasal dari luar negeri sebesar 2,3 persen pada waktu pendapatan per kapita \$ 100 menjadi hanya 0,6 persen pada waktu pendapatan per kapita mencapai \$ 1000.

1. Pendapatan Pemerintah

Tingkat pendapatan pemerintah meningkat dari 15,3 persen pada tingkat pendapatan \$ 100 menjadi 28,7 persen pada tingkat pendapatan per kapita sebesar \$ 1000. Peningkatan pendapatan pemerintah utamanya disebabkan oleh meningkatnya penerimaan pajak 12,9 persen menjadi 25,4 persen.

2. Tingkat Pendidikan

Untuk menggambarkan perkembangan tingkat pendidikan digunakan dua indikator, yaitu besarnya persentase pengeluaran pendidikan terhadap PDB dan persentase anak-anak usia sekolah. Pada

saat pendapatan per kapita \$ 100, tingkat pengeluaran untuk pendidikan sebesar 3,3 persen meningkat menjadi 4,3 persen pada saat pendapatan per kapita sebesar \$ 1000. Sementara itu, persentase anak-anak berada di sekolah baik tingkat pendidikan sekolah dasar maupun sekolah menengah meningkat dari 37,5 persen menjadi 84,2 persen.

B. Proses Alokasi Sumber-Sumber Daya

1. Struktur Permintaan Domestik.

Untuk menunjukkan ciri-ciri perubahan struktur permintaan domestik digunakan empat macam proses perubahan, yaitu tingkat pembentukan modal, tingkat konsumsi rumah tangga, tingkat konsumsi pemerintah dan tingkat konsumsi bahan makanan.

Keempat jenis perubahan diatas memiliki arah yang berbeda-beda. Pembentukan modal sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya memiliki peningkatan yang cukup besar seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita. Tingkat konsumsi pemerintah juga meningkat dari 13,7 persen menjadi 14,8 persen.

Jika perubahan tingkat penerimaan pemerintah dibandingkan dengan perubahan tingkat konsumsi pemerintah,

ternyata perbedaan itu semakin besar sejalan dengan meningkatnya pendapatan per kapita. Pada saat pendapatan per kapita sebesar US \$ 100 perbedaan itu sebesar 1,6 persen dan meningkat menjadi 14 persen ketika pendapatan per kapita sebesar US \$ 1000.

Hasil penelitian Chennery dan Syrquin juga menunjukkan, pada tingkat pendapatan per kapita meningkat dari US \$ 100 menjadi US \$ 1000, persentase konsumsi rumah tangga menurun dari 72,8 persen menjadi 61,7 persen. Persentase konsumsi atas bahan makanan juga menurun dari 39,2 persen menjadi 17,5 persen. Kesimpulan ini sejalan dengan hasil temuan Kuznets yang berkaitan dengan hukum Engel sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

2. Struktur Produksi.

Gambaran yang diperoleh mengenai corak perubahan struktur produksi dalam penyelidikan Chennery dan Syrquin memperkuat hasil-hasil yang telah diperoleh sebelumnya mengenai ciri-ciri perubahan struktur ekonomi dalam proses pembangunan. Pada saat pendapatan per kapita meningkat dari US \$ 100 menjadi US \$ 1000 terjadi penurunan peran sektor pertanian dalam menciptakan produk nasional dari 45,2 persen menjadi 13,8

persen. Peran sektor industri meningkat dari 14,9 persen menjadi 34,7 persen. Dan peranan sektor jasa-jasa juga bertambah tinggi tetapi pertambahan relatif kecil, yaitu dari 33,8 persen menjadi 41,3 persen.

3. Struktur Perdagangan

Peranan ekspor dalam kegiatan ekonomi nasional menjadi bertambah penting, dan peranan yang bertambah penting ini terutama disebabkan oleh bertambah pentingnya peranan ekspor barang-barang industri pengolahan dan ekspor jasa-jasa. Sedangkan ekspor bahan mentah menurun peranannya. Secara keseluruhan peranan ekspor meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita. Pada saat pendapatan per kapita US \$ 100 peranan ekspor sebesar 19,5 persen meningkat 26 persen pada saat pendapatan per kapita menjadi US \$ 1000. Peranan ekspor barang-barang industri meningkat dari 1,9 persent menjadi 9,7 persen, dan peranan ekspor jasa-jasa meningkat dari 3,1 persen menjadi 5,7 persen. Sedangkan peranan ekspor bahan mentah menurut dari 13,7 persen menjadi 9,6 persen. Pertambahan ekspor yang cukup besar, memungkinkan impor barang-barang dan jasa meningkat pula. Dalam penyelidikan ini seiring dengan meningkatnya pendapat per

kapita impor naik dari 21,8 persen menjadi 26,7 persen.

C. Proses Demografis dan Distributif

1. Penggunaan Tenaga Kerja

Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Kuznets di negara-negara maju se abad yang lalu, terjadi juga pada negara-negara berkembang. Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, peran sektor pertanian dalam menampung tenaga kerja menurun, sedangkan sektor industri dan jasa meningkat perannya.

Pada saat pendapatan per kapita sebesar US \$ 100, peranan sektor pertanian, industri dan jasa dalam menampung tenaga kerja berturut-turut sebesar 65,9 persen, 9,1 persen dan 25,1 persen. Tetapi ketika pendapatan per kapita meningkat menjadi US \$ 1000, peranan sektor pertanian, industri dan jasa dalam menampung tenaga kerja berubah masing-masing menjadi 25,2 persen, 32,5 persen dan 42,3 persen.

2. Urbanisasi, Tingkat Kelahiran dan Tingkat Kematian

Hasil penyelidikan Chennery menunjukkan bahwa pada tingkat pendapatan per kapita sebesar uS \$ 100 sebanyak 12,8 persen dari seluruh jumlah penduduk suatu negara berada di daerah perkotaan, tingkat

kelahiran sebesar 4,49 persen, tingkat kematian sebesar 2,09 persen. Pada saat pendapatan per kapita sebesar US 5 1000 penduduk yang tinggal di daerah perkotaan berubah menjadi 63,4 persen dari seluruh penduduk. Tingkat kelahiran menurun menjadi 2,29 persen dan tingkat kematian juga menurun menjadi hanya 0,97 persen dari keseluruhan jumlah penduduk.

3. Distribusi Pendapatan.

Untuk melihat perubahan dalam distribusi pendapatan dalam proses pembangunan perlu memperhatikan : 1) Perubahan bagian pendapatan nasional diterima oleh 40 persen dari keseluruhan penduduk yang tergolong berpendapatan rendah. 2) Perubahan bagian pendapatan nasional yang diterima oleh 20 persen dari penduduk yang tergolong berpendapatan tinggi.

Keseimpulan hasil penelitian Chennery dan Syrquin menunjukkan, masyarakat yang termasuk dalam golongan penerima pendapatan tertinggi akan menerima bagian dari pendapatan nasional yang makin bertambah pada tahap-tahap permulaan dari proses pembangunan dan mulai menurun apabila pendapatan per kapita mencapai US \$ 500. Sebaliknya, golongan masyarakat penerima pendapatan terendah

akan menerima bagian pendapatan nasional yang makin kecil pada tahap-tahap permulaan proses pembangunan, dan mulai meningkat manakala pendapatan per kapita mencapai US \$ 500.

Pembangunan industri agro sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah, ditujukan untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menyediakan barang dan jasa yang bermutu dengan harga yang bersaing di pasar dalam negeri dan luar negeri, menunjang pembangunan daerah dan sektor-sektor pembangunan lainnya serta sekaligus mengembangkan penguasaan teknologi. Dalam hubungan ini industrialisasi ditempuh dengan meningkatkan usaha-usaha pendalaman struktur dan keterkaitan industri sejauh mungkin mengkaitkannya dengan sektor-sektor ekonomi lainnya (Usman Hardi, 1996:3). Menurut Hartarto (1986) pola pengembangan industri nasional berintikan enam butir masalah, yaitu

- 1) Pengembangan industri sejauh mungkin diarahkan pada pendalaman struktur industri, dimana pelaksanaannya dikaitkan dengan sektor ekonomi lainnya seperti pertanian, kehutanan, pertambangan dan sumber daya kelautan. Selain itu juga dikaitkan dengan kelayakan ekonomi yang memperlihatkan skala ekonomi, pilihan

teknologi dan kemandirian pasar, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam butir pertama ini dikembangkan kelompok industri kimia dasar, industri logam dan aneka industri.

- 2) Pengembangan industri permesinan dan elektronika. Arah pengembangan ditujukan pada penanganan komoditi industri yang mempunyai pasar yang jelas, berulang dan meningkat. Untuk itu, pendekatannya diatur dengan pembuatan produk melalui lisensi, pembuatan melalui tahap *assembling* dan kemudian dilanjutkan pembuatan *manufacturing*. Dalam tahap awal, mutlak perlu dilaksanakan kebijaksanaan tataniaga bersifat sementara. Industri mesin dan elektronika yang dikembangkan meliputi mesin perkakas, mesin pertanian, alat-alat berat, mesin alat listrik, elektronika, kendaraan bermotor, kereta api, pesawat terbang, kapal dan mesin peralatan pabrik.
- 3) Pengembangan industri untuk ekspor. Usaha ini perlu ditingkatkan, sehingga secara bertahap ekspor komoditi industri mampu memberikan sumbangan yang nyata dalam meningkatkan ekspor non migas dan gas bumi (Migas). Selama ini 95 persen pelaku ekspor komoditi industri adalah perusahaan swasta. Untuk mengembangkan ekspor komoditi industri,

Departemen Perindustrian melakukan beberapa pendekatan. Industri yang memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantages*) diarahkan untuk lebih berorientasi ekspor. Selain itu juga dikembangkan industri yang semula bergerak dalam substitusi impor menjadi industri ekspor. Karena diberi subsidi silang dari hasil penjualan di dalam negeri, maka pada umumnya jumlah yang di ekspor tidak melebihi 20 persen Kapasitas Nasional Terpasang (KNT). Kebijakan semacam ini pernah dilakukan Jepang untuk mengembangkan ekspor komoditi industrinya.

- 4) Pengembangan Industri Kecil yang Tangguh. Dengan pengembangan ini maka partisipasi masyarakat dapat meluas sehingga masyarakat akan siap secara politik, sosial dan mental untuk menghadapi perubahan besar yang terjadi dalam proses industrialisasi. Cara pendekatannya adalah melalui pembentukan sentra industri kecil yang tersebar ke semua Propinsi di Indonesia. Pada tahun 1985 telah dibentuk 1.562 sentra industri kecil meliputi cabang industri seperti pangan, sandangm kulit, kimia dan bahan bangunan, kerajinan umum serta cabang industri logam. Pada umumnya

masalah yang dihadapi industri kecil menyangkut soal manajemen, modal dan mutu disamping soal pemasaran. Salah satu pemecahannya adalah melalui keterkaitan dengan perusahaan besar, baik industri maupun perdagangan.

- 5) Pengembangan industri nasional adalah dengan peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan terapan, rancang bangun dan perekayasaan. Kebijakan ini perlu didukung oleh kebijaksanaan moneter, khususnya dari aspek dana APBN atau kredit perbankan, sedangkan pemanfaatan dana pinjaman luar negeri perlu diatur kasus demi kasus. Pengembangan kemampuan ini merupakan keterpaduan berbagai disiplin ilmu, yaitu dalam bidang pengolahan, mesin listrik, arsitektur dan aspek wawasan lingkungan. Dewasa ini telah dikuasai rancang bangun dan perekayasaan dalam bidang industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan. Pola pengembangan butir kedua dan kelima ini dikerjakan oleh Menteri Habibie dalam beberapa tahun yang lalu.
- 6) Pengembangan kemampuan tenaga kerja industri. Dalam pola ini perlu ditumbuhkan terus kemampuan tenaga-tenaga profesi dan wiraswasta. Sejauh ini pihak swasta telah mulai melakukan pendidikan tenaga-tenaga

manajemen puncak/menengah, terampil dan tenaga ahli.

D. Perubahan Struktur Ekonomi Wilayah Model Eric C. wang

Eric W. Chang melakukan riset terhadap perubahan struktur di negara Taiwan dengan menggunakan data input-output. Metode pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan perubahan angka indeks dari sisi *demand* atau *Rowscaler* (RS^T) dan dari sisi suplai atau *Columnscaler* (CS^T).

Menurut Dergibson Siagian (2000:125), angka indeks biasanya digunakan untuk membandingkan perubahan dari suatu periode ke periode lainnya. Periode yang digunakan dapat berupa tahun, bulan atau satuan pengukuran lain. Angka indeks hampir digunakan di semua bidang pendidikan dikenal Indeks Prestasi (IP), dalam psikologi dikenal Indeks Kecerdasan (IQ), dalam sosiologi dipakai perubahan penduduk, dan lain-lain. Walaupun dalam kenyataannya banyak didapati angka indeks lain, tetapi secara umum cara penghitungannya dan prinsip yang digunakan hampir sama.

Salah satu keunggulan penggunaan angka indeks dibandingkan dengan penggunaan angka absolute adalah secara relatif mudah dipahami besaran perkembangan suatu variabel ekonomi serta trend perkembangannya di masa yang akan datang.

Berdasarkan data angka indeks menunjukkan perubahan struktur yang terjadi adalah sektor primer menurun dengan 2 persen sedangkan sektor tersier naik dengan 2 persen dan sektor sekunder tidak mengalami kenaikan. Sedangkan bila dilihat dengan angka absolute masing-masing sektor primer naik sebesar 5, sedangkan sektor tersier turun sebesar 5, dan sektor sekunder tidak mengalami perubahan. Dari dua pendekatan diatas, angka indeks mudah dipahami karena secara relatif dapat mengidentifikasi seberapa besar perubahan variabel PDB diatas serta trendnya di masa yang akan datang.

Dalam hal ini menggunakan angka indeks *Rawscaler* dan *Columnscaler* melalui model perubahan struktur ekonomi versi Eric W. Chang. Model ini memiliki spesifikasi khususnya tidak saja dapat mengidentifikasi penentu perubahan struktur dari sisi *dem and* tapi juga dari sisi suplai seperti variabel nilai tambah dan distribusi pemakaian input lokal (pendekatan dari sisi *demand* dan sisi *suplay*).

Hal ini lah yang membedakan dengan model perubahan struktur sebelumnya seperti model *Physiokrasi* yang menitikberatkan pada pergeseran peran bahan pertanian menjadi barang industri. Dengan mengasumsikan sektor industri steril, maka kajian mazhab ini menitikberatkan faktor penentu perubahan struktur dari sisi suplai. Demikian juga Leontif kajiannya tentang perubahan

struktur lebih mengarah pada peran perubahan teknologi dimana orientasinya dititikberatkan dari sisi suplai. Agak berbeda dengan model *Physiokrasi* dan model Leontif, model Cholis Chennery lebih melihat penentu perubahan struktur dari sisi *demand* yang terdiri atas permintaan antara, konsumsi rumah tangga dan ekspor.

Hasil analisis Eric W. Chang terhadap perubahan stuktur negara Taiwan menunjukkan bahwa pada periode pembangunan pertama (1966-1976) merupakan periode ekspansi ekspor dengan basis labr intensif ada 12 sektor memperoleh RS^T lebih kecil dari satu dan 17 sektor memperoleh RS^T lebih besar dari satu. Ke 17 sektor tersebut umumnya tergolong dalam industri yang memproduksi beraneka macam produk manufaktur dengan peningkatan yang cukup signifikan dalam permintaan akhir khususnya sektor ekspor. Sub sektor yang mengalami penurunan cukup signifikan dengan memperoleh indeks RS^T lebih kecil dari satu adalah sub sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan industri makanan.

Periode pembangunan kedua (1976-1981) yang merupakan fase pengembangan infrastruktur dan kebijakan substitusi impor dalam produksi barang setengah jadi. Dalam periode ini kebijakan promosi ekspor tetap dilanjutkan sehingga berdampak pada peningkatan RS^T dari 11 sektor ekonomi dengan menggunakan tahun dasar 1976. Sektor listrik, petroleum, transportasi dan beraneka produk

menjadi primadona dalam periode ini. Produk-produk tersebut telah memperkuat struktur hubungan permintaan inter industri. Misalnya produk *assembling* motor dan *sparepart* otomotif yang ditujukan untuk ekspor telah memperkuat pertumbuhan sektor transportasi.

Periode pembangunan ketiga (1981-1986) dikenal sebagai fase kebangkitan teknologi. Dalam periode ini sektor listrik rumah tangga, elektronik, konstruksi dan alat-alat mesin memperoleh RS^T tertinggi dengan kandungan teknologi tinggi dan padat modal. Produk komponen listrik dan *assembling personal computer* mencapai penguasaan pasar domestik dan luar negeri sehingga mempercepat laju pertumbuhan bisnis.

Periode pembangunan ke empat (1986-1991) adalah periode pembangunan dengan kematangan ekonomi yang berbasis pada penggunaan teknologi tinggi dan ekspansi permintaan domestik. Hasil observasi menunjukkan beraneka service cukup berkembang dalam periode ini dengan memperoleh RS^T tertinggi akibat peningkatan permintaan antara dan permintaan akhir. Sektor-sektor lainnya yang cukup berkembang dalam periode ini adalah elektronik, transportasi dan industri permesinan.

Dengan menggunakan pendekatan *Columnscaler* (CS^T) menunjukkan bahwa selama periode pembangunan pertama (1966-1976) terjadi perubahan struktur pada aneka produk manufaktur, elektronik, garmen, asesoris dan lain-

lain. Periode pembangunan kedua (1976-1981) merupakan periode ekspansi ekspor dan kebijakan substitusi impor terhadap produk barang antara (setengah jadi) produk yang mengalami perubahan struktur adalah petroleum, kelistrikan, perdagangan umum dan lain-lain.

Sektor yang memperoleh CS^T pada periode pembangunan ketiga (1981-1986) yang merupakan awal dari fase orientasi teknologi adalah kelistrikan rumah tangga, elektronik, alat-alat mesin dan listrik, gas dan air minum, transportasi dan komunikasi, pergudangan dan lain-lain. Pada periode pembangunan keempat (1986-1991) yang merupakan fase pemantapan permintaan domestik sektor yang memperoleh CS^T tertinggi adalah aneka jasa, konstruksi, peralatan transportasi, mesin-mesin dan lain-lain.

Perubahan RS^T di atas pada dasarnya dapat dibagi atas dua komponen, Pertama, karena faktor perubahan koefisien teknis (RS^T) dan kedua, karena perubahan permintaan akhir (RS^b). Perubahan CS^T juga dibagi atas dua komponen yaitu Pertama, karena perubahan distribusi pemakaian input (RS^a), Kedua karena perubahan nilai tambah (RS^b).

Dilihat dari sudut *demand* hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam periode observasi perubahan permintaan akhir lebih berperan dalam perubahan struktur karena keberhasilan Taiwan dalam strategi promosi ekspor yang memberi kontribusi lebih besar daripada perubahan teknis

atau perubahan harga. Dari segi suplai yang lebih berperan dalam perubahan struktur adalah perubahan distribusi pemakaian input daripada perubahan nilai tambah.

BAB 7

Distribusi Pendapatan

Konsep pembangunan yang menitikberatkan pada aspek pertumbuhan ekonomi semakin gencar mendapat sorotan sejak tahun 1970 an karena dinilai telah gagal memberantas dan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang semakin meluas di masyarakat. Para ekonom menyadari bahwa peningkatan dalam pendapatan per kapita belum cukup untuk menilai prestasi pembangunan. Kesadaran ini melahirkan berbagai pandangan tentang cara-cara mengukur distribusi pendapatan.

Menurut Michael P. Todaro (1994:143) umumnya para ahli ekonomi membedakan konsep distribusi pendapatan atas : 1) distribusi pendapatan perorangan atau antar kelompok, dan 2) distribusi pendapatan fungsional atau distribusi pendapatan berdasarkan atas harga-harga produksi.

Konsep distribusi pendapatan perorangan atau kelompok digunakan untuk mengukur besaran pendapatan yang diterima masing-masing individu atau kelompok. Konsep ini menggunakan penghasilan masing-masing individu tanpa

mempertimbangkan dari mana penghasilan itu diperoleh, misalnya dari balas jasa, tenaga kerja, sewa, bunga dan keuntungan. Demikian juga apakah penghasilan ini berasal dari perkotaan atau pedesaan, berasal dari sektor pertanian, perindustrian, jasa dan lain-lain (Cornelis Rintuh, 1995:165). Sedangkan konsep distribusi fungsional adalah sumbangan dari para ahli ekonomi klasik yang melacak pembagian pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan produksi yang diikuti sertakan dalam kegiatan produksi barang dan jasa.

Perangkat analisisnya adalah fungsi produksi serta alokasi-alokasi faktor-faktor produksi yang diikuti sertakan dalam fungsi. Karena hubungan antara balas jasa input yang dipergunakan dengan output yang dihasilkan dalam proses produksi adalah spesifik, maka pendekatan ini lebih jarang digunakan bila dibandingkan dengan pendekatan distribusi pendapatan antar kelompok.

A. Distribusi Pendapatan Antar Kelompok

Distribusi pendapatan antar kelompok menurut Susanto dalam Sanusi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1) Menaksir persentase pendapatan yang diterima masing-masing golongan, 2) Menaksir distribusi pendapatan dengan indikator khusus, yaitu dengan pendekatan statistik seperti koefisien variasi, standar deviasi,

koefisien gini, indeks Kuznets dan indeks Oshima (Sanusi, 1998:39).

Penaksiran distribusi pendapatan berdasarkan persentase yang diterima masing-masing golongan dilakukan dengan membagi kelompok sasaran atas beberapa kelompok, umumnya 5 kelompok (*decile*) sampai dengan 10 kelompok (*quintiles*) sesuai dengan tingkat pendapatan mereka, kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok ke dalam pendapatan total. Menurut versi Bank Dunia kelompok tersebut dibagi atas tiga golongan yaitu : 40 persen penduduk berpendapatan rendah (penduduk termiskin), 40 persen penduduk berpendapatan menengah, serta 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi (penduduk terkaya).

Ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi dinyatakan parah apabila 40 persen penduduk berpendapatan terendah menikmati kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan dianggap sedang bila 40 persen penduduk termiskin menikmati antara 12 hingga 17 persen pendapatan nasional. Sedangkan jika 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah menikmati lebih dari 17 persen pendapatan nasional, maka kesenjangan pendapatan dianggap lunak atau distribusi pendapatan dianggap cukup merata.

Berdasarkan data menunjukkan pengelompokan pendapatan atas 10 kelompok (*decile*) dengan

jumlah yang sama, masing-masing 10 persen pertama, 10 persen kedua dan seterusnya hingga 10 persen ke sepuluh. Garis vertical menunjukkan persentase pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Garis horizontal menggambarkan persentase masyarakat sebagai penerima pendapatan. Hubungan antara kedua angka dalam sumbu vertical dan horizontal lazim disebut sebagai *Curve Lorenz* yang ditunjukkan oleh titik a,b,c,d,e,f,g,h,i. Garis lurus dengan sudut 45° yang merupakan garis diagonal menunjukkan pemerataan mutlak, sedangkan garis segitiga OPQ menunjukkan ketidakmerataan mutlak. Pada kedua bentuk ekstrem ini sangat sulit ditemui di lapangan, yang lazim terjadi adalah bentuk lengkung yang ditunjukkan oleh *curve Lorenz*. Semakin jauh dari garis diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, yang berarti distribusi pendapatan semakin timpang.

Cara lain untuk mengukur distribusi pendapatan adalah dengan menghitung rasio gini (*gini ratio*). Rasio gini adalah suatu koefisien yang berkisar angka 0 hingga 1 yang menjelaskan kadar pemerataan (ketimpangan) distribusi pendapatan nasional. Semakin kecil (semakin mendekati nol) koefisiennya semakin merata distribusi pendapatan.

Demikian sebaliknya semakin besar koefisien rasio gini semakin timpang pendapatan. Angka rasio gini dapat ditaksir secara visual langsung dari

curve Lorenz, yaitu perbandingan luas area yang terletak diantara *curve Lorenz* dan diagonal terhadap luas area segitiga OPQ. Semakin lengkung *curve Lorenz*, semakin tinggi rasio gini atau semakin timpang pendapatan.

Menurut King dan Weldon dalam Sanusi (1999:42-45), koefisien gini sebagai alat pengukur distribusi pendapatan mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu : 1) teknik perhitungannya tidak terikat pada asumsi-asumsi bentuk penyebaran pendapatan, 2) perhitungannya lebih mudah karena menggunakan angka-angka dari *curve Lorenz*, 3) dapat digunakan sebagai perbandingan mengenai arah kecenderungan sifat dari distribusi pendapatan masyarakat. Adapun kelemahannya adalah : 1) koefisien gini tidak peka terhadap perubahan-perubahan yang kecil, 2) koefisien gini memperlakukan perbedaan-perbedaan absolute secara sama rata dengan tidak memperdulikan dimana timbulnya dalam spektrum pendapatan, 3) koefisien gini sangat dipengaruhi oleh nilai rata-rata yang dipilih untuk kelompok pendapatan teratas.

Dalam kenyataannya dari sekian banyak rumus yang sering digunakan adalah indeks gini. Menurut Poli (1995) hal demikian itu dikarenakan indeks gini selain mudah digunakan, juga rumusnya dapat dijabarkan ke dalam *curve Lorenz*, sehingga dapat memberikan gambaran secara

visual tentang kesenjangan distribusi pendapatan dalam masyarakat tertentu.

Walaupun demikian pendekatan rasio gini menurut Dumairy bukanlah merupakan indikator paling ideal tentang ketimpangan pendapatan antar lapisan masyarakat. Namun setiak-tidaknya ia cukup memberikan gambaran mengenai kecenderungan umum dalam pola pembagian pendapatan (Dumairy, 1997:56).

Hal ini berkaitan dengan masih adanya kelemahan pendekatan perhitungan baik pendekatan pengeluaran maupun pendekatan pendapatan. Namun demikian diakui oleh Dumairy bahwa pendekatan pendapatan lebih realistis dibandingkan dengan pendekatan pengeluaran. Dalam pendekatan pengeluaran cenderung kerendahan (*under estimated*).

Hal ini dikarenakan unsur tabungan yang merupakan bagian dari pendapatan tidak turut dihitung. Padahal bagian pendapatan yang ditabung oleh masyarakat cukup besar bagi lapisan masyarakat yang berpendapatan tinggi. Di lain pihak, beberapa rumah tangga yang pendapatannya relatif rendah untuk memenuhi konsumsi tidak jarang melakukan pinjaman, inipun tidak teramati sehingga data ditaksir lebih tinggi. Sebagai akibat dari kelemahan itu, maka hasil perhitungan dari indeks gini dengan pendekatan pengeluaran biasanya lebih kecil daripada hasil

perhitungan dengan menggunakan pendekatan pendapatan.

Dalam prakteknya kajian terhadap distribusi pendapatan dirasakan masih kurang menggembirakan. Hal ini selain berkaitan dengan belum adanya kesamaan pandangan tentang indikator dan kerangka acuan yang digunakan (Prisma, 1976), juga nampaknya belum semua kebijakan efektif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Selain contoh di Filipina, efek pengeluaran pemerintah untuk jaminan sosial tidak bisa memperbaiki ketimpangan pendapatan, walaupun kebijakan yang sama di Jepang cukup berhasil dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Di Srilanka kebijaksanaan yang konon paling efektif untuk mewujudkan kesejahteraan sosial memang memperbaiki perataan pendapatan (Indeks Gini menurun dari 0,45 menjadi 0,35 antara tahun 1963-1973), namun hal ini diikuti dengan bertambahnya pengangguran dari 13 persen menjadi 24 persen dari seluruh angkatan kerja yang ada. Sebaliknya di Taiwan perbaikan ketidakmerataan pendapatan telah mengurangi pengangguran sebesar 1 persen dalam keadaan laju pertumbuhan ekonomi meningkat dengan satu persen setahun (Oshima dalam Prisma, 1976).

Di Indonesia kajian terhadap profil distribusi pendapatan, terutama distribusi pendapatan antar kelompok pendapatan masyarakat Indonesia, sejak

tahun 1973 sudah mulai banyak dipublikasikan antara lain oleh Sundrum-Esmara (1975), Parera (1977), Sajogyo (1977), King dan Weldon (1975), Gupta (1977), Hasibuan (1978), Asra (1980), Biro Pusat Statistik secara berkala dan lain-lain.

Kajian ini pada umumnya bersifat makro dengan metode pengukuran yang berbeda-beda dan bahkan dalam beberapa artikel tidak mencantumkan ukuran-ukuran yang digunakan. Data utama yang sering digunakan adalah bersumber dari Biro Pusat Statistik, yang diperoleh melalui Survey Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS). Publikasi ini umumnya terbatas pada pengukuran tingkat kesenjangan, sedangkan bahasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan masih kurang.

Berdasarkan data yang ada diperoleh hasil yang menggambarkan beberapa hal, yaitu :

1. Pada tahun 1960 an hingga tahun 1970 an ternyata distribusi pendapatan di Jawa lebih bagus daripada di luar Jawa. Nanti mulai tahun 1970 an distribusi pendapatan di luar Jawa mengalami perbaikan sehingga distribusi pendapatannya lebih bagus daripada di Jawa. Hal ini dapat dilihat dari publikasi Dumairy (1997) atau publikasi Biro Pusat Statistik.
2. Secara umum hasil analisis juga menggambarkan umumnya distribusi pendapatan di perkotaan lebih timpang

daripada di pedesaan. Namun hasil analisis ini agak berbeda kalau dikaji secara mikro seperti yang digambarkan oleh Sondakh (1994), bahwa ternyata distribusi pendapatan di pedesaan semakin timpang skibat semakin terbukanya perekonomian desa terhadap perekonomian global yang berdampak pada tergesurnya penduduk desa yang tidak memiliki akses terhadap modal, kredit dan penguasa. Contohnya, sekarang ini tanah-tanah strategis di sepanjang jalur Trans Sulawesi sudah banyak dikuasai oleh orang-orang Kota. Ironisnya dana pembebasan tanah adalah dana masyarakat (*public funds*) karena mereka memiliki akses terhadap perbankan, mendapatkan kemudahan kredit lunak untuk operasi proyeknya.

3. Walaupun kelihatannya hasil publikasi statistik menggambarkan distribusi pendapatan yang kurang stabil, namun ada kecenderungan terjadinya penurunan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan di Indonesia.

B. Distribusi Pendapatan Antar Daerah

Ketimpangan pendapatan antar daerah (*region*) menjadi bahasan yang menarik khususnya apabila dikaitkan dengan tujuan pembangunan nasional dimana salah satu unsur didalamnya tuntutan

terhadap pemerataan pembangunan sampai ke pelosok pedesaan. Menurut Djojohadikusumo (1994:158), ketimpangan pendapatan antar daerah mempunyai kaitannya dengan pola dan arah investasi serta prioritas alokasi investasi di berbagai daerah yang pada gilirannya akan menentukan tingkat pertumbuhan daerah dan akhirnya berpengaruh pada tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antar daerah.

Dalam ekonomi ter regional dikenal model yang menggambarkan hubungan yang tidak seimbang antara daerah pertumbuhan (*centre*) dan wilayah pinggir (*periphery*). Daerah pertumbuhan akan mempunyai kesempatan berkembang yang lebih besar dari daerah pinggir, sehingga ketimpangan antar daerah akan melebar. Ketimpangan ini terjadi karena efek polarisasi atau *backwash effect*, yaitu terhambatnya perkembangan ekonomi daerah pinggir serta tidak berjalannya mekanisme *trickle down effect* atau *spread effect* secara baik.

Model pertumbuhan neo klasik beranggapan, pertumbuhan antar daerah akan mengarah pada pola *konvergen* (merata) walaupun tanpa campur tangan pemerintah, sementara model pertumbuhan Harold-Dommar mengisyaratkan pertumbuhan antar daerah mengarah pada pola *divergen*, oleh karenanya diperlukan campur tangan pemerintah. Perlunya campur tangan pemerintah ini karena dalam kenyataannya modal bukan mengalir dari daerah yang maju ke daerah yang kurang maju

seperti yang diisyaratkan dalam teori Harold_Dommar, melainkan terjadi yang sebaliknya. Berhubungan dengan itu, Myrdal, Hirschman, dan Friedman juga sependapat dengan Harold-Dommar bahwa pertumbuhan antar daerah tidak mengarah pada satu titik temu (Glasson dalam Sanusi, 1998:51).

Hirschman (1973:183), menyatakan bahwa dalam suatu daerah yang cukup luas, hanya terdapat beberapa pusat pertumbuhan (*growing centre*). Industri-industri akan berkelompok pada daerah tertentu, dimana hal ini disebabkan oleh karena adanya manfaat bersama antar industri, sehingga menimbulkan adanya pembatasan wilayah yaitu daerah pusat dan daerah pinggir (*periphery*).

Antara daerah pusat dan daerah pinggir terjadi saling ketergantungan barang dan tenaga kerja. Jika saling ketergantungan tersebut kuat, maka akan terjadi proses penyebaran pembangunan ke daerah pinggir (*trickle down effect*), dan sebaliknya jika saling ketergantungan tidak kuat maka proses pembangunan akan timpang (terjadi polarisasi). Dari proses tersebut Hirschman menyarankan dibentuknya titik pertumbuhan (*growth pole*) yang lebih banyak.

Kesenjangan daerah akan memberikan pengaruh yang tidak baik bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah. J.G Wlliamson 1968, dalam

Sadono Sukirno (1985:60) mengungkapkan bahwa konsekuensi yang ditimbulkan dari ketimpangan antar daerah adalah:

- 1) Makin besarnya arus migrasi penduduk desa, terutama yang memiliki keterampilan (*skill*), masuk ke wilayah perkotaan karena peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.
- 2) Investasi cenderung mengalir ke daerah-daerah yang sudah berkembang dengan tingkat sarana dan prasarana yang memberikan keuntungan dan aglomerasi yang tinggi.
- 3) Pemerintah cenderung melakukan investasi pembangunan di daerah-daerah yang sudah berkembang. Hal ini semakin memperburuk perbedaan kemajuan antar daerah.
- 4) Tidak adanya keterkaitan (*linkages*) antar pusa regional (*regional market*) ke kota maupun ke daerah pedesaan melalui kota-kota tertentu, yang menghambat proses penyebaran kemajuan (*spread effect*) ke daerah-daerah lain. Akibatnya intensitas dan konsentrasi kegiatan dan hasil pembangunan hanya terjadi pada daerah-daerah yang telah berkembang (Luthfi Muta'ali dalam Udjiyanto D.W, 1999:34).

Williamson (1965:110-115) dalam Sadono Sukirno (1985:60) melakukan analisis tentang

kesenjangan distribusi pendapatan di berbagai negara dengan mengambil sampel sebanyak 24 negara dalam kurun waktu 10 tahun (1950-1960).

Dengan menggunakan formula yang menganalisis tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antar negara diperoleh kesimpulan bahwa tingkat kesenjangan distribusi pendapatan tertinggi terjadi pada negara Brazil sebesar 0,700. Sedangkan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan terkecil pada negara Australia dengan nilai koefisien sebesar 0,058. Bila ke 24 negara tersebut dikelompokkan ke dalam negara berpendapatan rendah dan tinggi diperoleh kesimpulan, ternyata tingkat kesenjangan distribusi pendapatan pada kelompok negara yang berpendapatan tinggi lebih besar dibandingkan dengan kelompok negara yang berpendapatan rendah. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien variasi Williamson sebesar 0,464 untuk kelompok berpendapatan tinggi dan sebesar 0,139 untuk kelompok negara berpendapatan rendah.

Dengan menggunakan formula yang sama, di Indonesia telah pula dilakukan perhitungan distribusi pendapatan antar daerah antara lain oleh Esmara (1975), Uppal dan Budiono (1986), Soeroso (1989), Safrizal (1997), Sanusi (1998), Didit (1999), dan lain-lain. Walaupun tahun pengamatan agak berbeda-beda, namun menghasilkan kesimpulan yang hampir sama bahwa distribusi pendapatan antar daerah di Indonesia cenderung berfluktuasi.

Kecenderungan ini menurut Uppal dan Budiono antara lain disebabkan oleh variasi anggaran belanja pemerintah pusat dan bantuan Propinsi.

Secara spesifik Sanusi mengidentifikasi dalam penelitiannya di Jawa Tengah dalam kurun waktu 1978-1989 bahwa terjadinya kesenjangan antar daerah di Jawa Tengah disebabkan oleh kurangnya infrastruktur di beberapa Kabupaten, perbedaan tingkat pendidikan masyarakat di masing-masing Kabupaten dan penanaman modal yang terkonsentrasi di beberapa daerah seperti di Kabupaten Cilacap dan Kudus (Sanusi, 1998:57).

Lain halnya dengan Didit Welly Udjiyanto (1999) dalam penelitiannya tentang studi komparatif pembangunan ekonomi dan distribusi pendapatan di daerah tingkat II di Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan bahwa selama ini alokasi dana sektoral ditujukan kepada daerah yang merupakan sektor basis dan tingkat pertumbuhan tinggi telah menyebabkan ketidakmerataan pendapatan antar daerah yang semakin besar di daerah tersebut.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Myrdal (1957), bahwa dari masa ke masa investasi akan mengalir dari daerah yang relatif miskin ke daerah-daerah yang relatif kaya. Gejala ini timbul sebagai akibat dari kombinasi dua faktor berikut : 1) Tabungan yang ada di daerah miskin walaupun jumlahnya kecil, tidak dapat digunakan secara efektif karena kurangnya permintaan investasi

daerah tersebut. 2) Tabungan akan diinvestasikan ke daerah yang relatif lebih kaya, karena akan terjamin dan akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Keadaan semacam ini oleh Hirshman disebut sebagai *polarization effect* yang ternyata lebih kuat dibandingkan dengan *trickle down effect* yaitu faktor-faktor yang dapat menimbulkan pengaruh menguntungkan bagi pertumbuhan suatu daerah.

C. Distribusi Pendapatan antar Sektor

Kajian tentang distribusi pendapatan antar sektor belum banyak dilakukan sebagaimana kajian tentang distribusi pendapatan antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena kajian tentang distribusi pendapatan antar kelompok dalam masyarakat berhubungan secara langsung dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat atau dengan kata lain terjadinya distribusi pendapatan antar kelompok, dampaknya dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat misalnya terjadinya polarisasi kehidupan masyarakat yang dicirikan oleh pendapatan, lingkungan, gaya hidup dan lain-lain.

Hal ini kalau dibiarkan memiliki implikasi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat berupa munculnya kriminalitas yang mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta kestabilan politik dan keamanan serta pemerintahan. Oleh karena itu kajian ini senantiasa

menarik dilihat dari perspektif kepentingan masyarakat dan kestabilan pemerintahan.

Agak berbeda dengan kajian tentang distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat, distribusi pendapatan antar sektor mengkaji ketimpangan pendapatan yang terjadi antar kelompok masyarakat yang bekerja pada suatu sektor dengan sektor lainnya, atau perbedaan dalam penciptaan nilai tambah yang dihasilkan antar sektor. Nurimansyah Hasibuan (1993), mengemukakan bahwa kesenjangan distribusi pendapatan antar sektor industri antara tahun 1975-1980 hampir tidak berubah. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh simpangan baku upah/gaji terlihat relatif tetap. Tetapi kelemahan utama angka-angka ini terbatas pada industri sedang dan besar.

Lebih lanjut menurut Nurimansyah bahwa kesenjangan pendapatan antar sektor selain dapat dijelaskan oleh perbedaan upah atau gaji juga dapat dijelaskan oleh faktor wilayah, keterampilan, umur, jenis kelamin, skala perusahaan, nilai tambah yang diciptakan industri, modal, konsentrasi dan pendidikan. Kesemua variabel tersebut dapat didekati dengan analisis regresi yang mengungkapkan hubungan atau pengaruh antar variabel.

Cara lain dalam melihat distribusi pendapatan antar sektor dapat didekati dengan analisis input-output. Teknik perhitungannya juga antara lain bisa dengan menggunakan angka indeks gini yang

dihitung dari perbedaan upah dan gaji, pajak, dan nilai tambah dalam berbagai sektor ekonomi. Selain daripada itu dengan menggunakan model input-output dapat diketahui pula distribusi pemakaian input antar sektor yang melihat dari sisi alokasi struktur yang menggambarkan distribusi pemakaian input produk antar sektor khususnya penggunaan input lokal. Teknik ini belum banyak dikenal kecuali disinyalir oleh Eric W. Chang (1996), dalam tulisannya tentang perubahan struktur perekonomian negara Taiwan.

Bab 8

Analisis Ketimpangan Antar Sektoral Di Sulawesi Tengah

A. Analisis Perubahan struktur Melalui Analisis Rawscaler Dan Columnscaler

1. Analisis Rawscaier

Analisa Rawscaler dimaksudkan untuk melihat sejauhmana peran dari perubahan hubungan interindustri yang dapat dilihat dari perubahan koefisien teknis dan perubahan final demand dalam mempengaruhi perubahan output. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terjadi perubahan struktur dalam beberapa sub sektor ekonomi yang ditunjukkan oleh besarnya Total Rawscaler (RS^T) lebih besar dari satu. Dari hasil perhitungan tersebut ada 8 sub sektor yang memperoleh RS^T lebih besar dari satu dan sisanya sebanyak 46 sub sektor memperoleh RS^T lebih kecil dari satu bahkan ada yang negatif.

Urutan pertama dari RS^T ternyata ditempati oleh sub sektor jasa hiburan dan kebudayaan dengan RS^T sebesar 9,98, kemudian diikuti oleh sub sektor tanaman perkebunan lainnya 4,81, jasa perorangan dan rumah tangga 4,12, sub sektor

cokelat 3,13, sub sektor restoran 3,06, industri makanan lainnya 2,49, jasa pendidikan dan kesehatan 1,63 dan jasa perbengkelan 1,50. Sub sektor yang termasuk kelompok lima besar memperoleh nilai RS^T terendah masing-masing adalah kegiatan tidak termasuk di mana-mana (-1), industri mesin dan alat-alat listrik (-1), industri pengilangan migas (-1), cengkeh, (-0,799), dan industri barang-barang lainnya (-0,671).

Secara umum perolehan RS^T di atas lebih disebabkan oleh peningkatan final demand daripada hubungan intersektoral. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat perolehan Rawscaler final demand (RS^b) umumnya lebih besar dari Rawscaler koefisien teknis (RS^a) terkecuali sub sektor jasa perbengkelan. Sebagai contoh sub sektor hiburan dan kebudayaan yang menempati urutan pertama dalam RS^T yang berarti mengalami peningkatan cukup signifikan dalam perolehan output ternyata memperoleh RS^b sebesar 10,73 dan RS^a sebesar 0,24 yang berarti pula peningkatan output sektor ini secara signifikan lebih disebabkan oleh peningkatan final demand daripada hubungan intersektoral.

Apabila ditelusuri lebih jauh umumnya final demand yang memberi sumbangan terhadap sub sektor hiburan dan kebudayaan adalah karena meningkatnya permintaan sektor rumah tangga dan pemerintah terhadap jasa hiburan. Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah daerah setempat

untuk lebih memberi perhatian dalam pengembangan sub sektor ini misalnya dengan penganekaragaman jenis hiburan serta lebih memngkatkan intensitas hiburan baik yang bernuansa kebudayaan maupun tidak. Dan bilamana perlu dapat mengikuti event internasional dalam promosi hiburan dan kebudayaan.

Sub sektor lainnya seperti sub sektor tanaman perkebunan dan sub sektor coklat dalam periode yang sama juga mengalaih peningkatan cukup signifikan. Peningkatan dua jenis komoditas tersebut selain karena relatif stabilnya permintaan domestik juga dipengaruhi peningkatan final demand khususnya oleh permintaan ekspor yang cukup signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh baik kestabilan harga internasional juga oleh masih tetap stabilnya permintaan internasional serta pasokan domestik tidak over suplai.

Lain halnya dengan cengkeh dan kelapa serta beberapa komoditas perkebunan lainnya yang memperoleh RS^T negatif dapat diartikan bahwa dalam periode tersebut mengalami penurunan baik koefisien teknis maupun final demand. Khusus untuk cengkeh hal ini disebabkan oleh seiaian terjadinya over suplai juga disebabkan oleh terlalu besarnya campur tangan pemerintah dalam mengatur tata niaga cengkeh maupun kelapa. Dalam tata niaga cengkeh diatur lewat mekanisme BPPC yang cenderung mengakibatkan distorsi dalam harga dan produk sedangkan tata niaga

kopra diatur lewat keputusan pemerintah yang membatasi ekspor kopra ke luar negeri.

Di masa yang akan datang sub sektor restoran perlu mendapat perhatian pemerintah berhubung sektor tersebut dalam periode analisis menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dengan RS^T sebesar 3,06. Peningkatan output dari sub sektor restoran lebih disebabkan oleh peningkatan final demand yang ditunjukkan oleh RS^b sebesar 3,12 sedangkan RS^a hanya sebesar 0,93. Apabila ditelusuri lebih jauh peningkatan final demand ini lebih disebabkan oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dari pada konsumsi pemerintah maupun ekspor. Hal ini dapat dibuktikan oleh banyaknya bisnis restoran dan rumah makan yang bermunculan di mana-mana yang menyajikan aneka menu ikan laut (*sea food*).

Satu-satunya sub sektor industri yang memperoleh RS^T lebih besar dari satu adalah industri makanan lainnya sedangkan sub sektor industri lainnya rata-rata memperoleh RS^T lebih kecil dari satu bahkan ada yang negatif. Kelesuan sub sektor industri dalam periode analisis selain disebabkan oleh kurang meningkatnya peran hubungan interindustri juga oleh tidak adanya peningkatan secara signifikan final demand produk sektor industri kecuali industri makanan lainnya yang mampu mempertahankan jumlah permintaan dari sektor rumah tangga terhadap produk industri

tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh perolehan RS^b sebesar 3,12 sedangkan RS^a sebesar 0,36.

2. Analisis Columnscaler

Untuk melengkapi analisis perubahan struktur digunakan analisis columnscaler yang melihat perubahan output dari sisi suplai. Perbedaan antara pendekatan rawscaler dengan columnscaler terletak pada latar belakang operasionalnya. Pendekatan rawscaler didasarkan pada perubahan struktur teknologi ekonomi (perubahan koefisien teknis) dan perubahan koefisien final demand, sedangkan pendekatan columnscaler didasarkan pada perubahan alokasi input dan value added. Sebagaimana dikatakan oleh Hoover (1975), Bon (1986), Chen dan Rose (1991) dan Bon dan Bing (1993) dalam Wang (1997) bahwa kedua model ini saling melengkapi dalam analisis dan peramalan setiap perubahan yang terjadi. Oleh karena itu keseimbangan model rawscaler dan columnscaler dapat menghasilkan analisis perubahan struktur.

Hasil perhitungan columnscaler yang mengkombinasikan koefisien alokasi input dan value added (nilai tambah) untuk dua periode tahun analisis. Apabila nilai total columnscaler (CS^T) dari suatu sektor lebih besar dari satu berarti terjadi peningkatan output dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh adanya perubahan distribusi pemakaian input dan perubahan koefisien value added dari tahun sebelumnya. Dari hasil

perhitungan menunjukkan bahwa perubahan struktur hanya terjadi pada 3 subsektor ekonomi yaitu sub sektor tanaman perkebunan lainnya menempati urutan pertama dengan nilai total columnscaler (CS^T) sebesar 2,44 yang diikuti oleh sub sektor coklat di urutan kedua dengan nilai CS^T sebesar 1,57 dan subsektor ternak dan hasil-hasilnya di urutan ketiga dengan nilai CS^T sebesar 1,31. Sisanya sebanyak 51 sub sektor ekonomi memperoleh nilai CS^T lebih kecil dari satu bahkan ada yang negatif.

Sub sektor yang termasuk lima besar memperoleh nilai CS^T terendah masing-masing adaiah cengkeh (-0,741), induski tembakau (-0,626), komunikasi (-0,529), tanaman umbi-umbian (-0,515), dan tanaman bahan makanan lainnya (-0,359).

Perolehan nilai CS^T dari ketiga sub sektor di atas yang lebih besar dari satu antara lain karena sektor-sektor tersebut dapat mengembangkan ekspor yang didukung oleh adanya kestabilan pasar dan harga. Sebagai contoh selama beberapa tahun terakhir Sulawesi Tengah dapat memelihara pasaran ekspor coklat ke berbagai negara namun sayangnya komotitas tersebut masih melalui Surabaya sebagai pelabuhan transito sebelum ke negara tujuan ekspor, sehingga nilai tambah yang dihasilkan dari ekspor tidak maksimai untuk daerah Sulawesi Tengah"

Apabila analisis columnscaler dilihat dari sisi koefisien alokasi input dan value added, maka ketiga komoditas di atas menghasilkan nilai koefisien columnscaler value added (cso) masing-masing tanaman perkebunan lainnya (2,67), coklat (2,15) ternak dan hasii-hasiinya (2,i6) iebih besar dari koefisien alokasi input (CS^a) masing-masing tanaman perkebunan lainnya (0,93), coklat (0,42), dan ternak dan hasil-hasilnya (0,15). Hal ini berarti bahwa peningkatan ouput di sektor ini karena adanya atau berdampak pada peningkatan value added seperti peningkatan upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung netto daripada peningkatan hubungan intersektoral atau distribusi pemakaian input antar sektor. Jenis sektor lainnya yang walaupun memperoleh nilai columnscaler total di bawah satu tetapi memperoleh columnscaier value added lebih besar dari satu adalah sub sektor padi (1.15), kayu (1,04), dan jasa pendidikan kesehatan (1,31).

Hal ini berarti bahwa peningkatan output di sektor ini tidak karena atau berdampak pada perbaikan koefisien alokasi input atau membaiknya distribusi pemakaian input antar sektor melainkan karena atau adanya peningkatan value added. Sebagai contoh output di sub sektor padi lebih banyak ditunjang oleh sub sektor perdagangan dan angkutan daripada sub sektor lainnya. Hal ini disebabkan antara lain sub sektor industri penunjang sektor ini belum mengalami kemajuan

misalnya pupuk lebih banyak disuplai oleh sub sektor perdagangan daripada sub sektor industri kimia. Demikian pula sub sektor perbankan, jasa perbengkelan dan lain-lain belum banyak berperan dalam produksi padi di mana hal ini sekaligus menggambarkan bahwa sistem panca usaha tani di daerah ini masih dilakukan secara tradisional.

Sub sektor lainnya seperti kayu peningkatan outputnya juga belum menggambarkan peningkatan alokasi input yang lebih merata. Hal ini dapat dipahami karena produk kayu merupakan barang primer sehingga peningkatan outputnya kurang banyak terkait dengan sub sektor lainnya seperti sub sektor industri terkecuali sub sektor angkutan banyak berperan dalam peningkatan output sektor ini. Selain adanya beberapa sektor yang memiliki columnscaler value added lebih besar dari satu, terdapat pula beberapa sub sektor yang hanya memiliki columnscaler alokasi input lebih besar dari satu seperti sub sektor industri tepung (1,01), industri semen dan kapur (1,27), industri kimia (1,20), industri karet/plastik (1,01), industri alat pengangkutan (1,67), air bersih (1,05), dan restoran (1,41). Hal ini berarti bahwa peningkatan output di sektor ini karena adanya peningkatan alokasi input yang dapat diartikan bahwa peningkatan hubungan intersektoral lebih besar daripada peningkatan value added di sektor ini.

B. Hubungan Antara Rawscaler Total dan corumnscaler Total

Dalam menganalisis hubungan antara Rawscaler Total (RS^T dengan Columscaler Total (CS^T) yang menunjukkan derajat perubahan struktur dalam tahapan pembangunan digunakan korelasi Pearson. Hasil perhitungan menunjukkan dua hal, pertama bahwa semua hubungan secara signifikan tidak sama dengan nol, walaupun bervariasi ada yang positif dan ada pula negatif.

Hubungan negatif seperti yang terjadi antara hubungan RS^a dengan RS^b yang berarti RS^a naik pada tingkat RS^b menurun demikian sebaliknya. Demikian pula hubungan yang terjadi antara RS^a dengan CS^b dan CS^a dengan CS^b . Kedua, hubungan antara RS^b dengan RS^T sangat signifikan pada derajat hubungan sebesar 0,976 yang berarti perubahan RS^T sangat dipengaruhi oleh variasi perubahan RS^b atau perubahan output dari sisi demand sangat dipengaruhi oleh variasi perubahan permintaan akhir (*final demand*) dari pada koefisien teknis atau hubungan inter industri. Hubungan inter industri dimaksudkan hubungan pemanfaatan input produk dari suatu sektor kepada sektor lainnya.

Tingkat pemanfaatan input antar sektor akan lebih meningkat apabila terjadi perubahan teknologi. Hubungan antara CS^b dengan CS^T juga cukup signifikan pada derajat hubungan sebesar 0,710 yang berarti perubahan CS^T sangat dipengaruhi

oleh variasi perubahan CS^b atau perubahan output dari sisi suplai sangat dipengaruhi oleh variasi perubahan nilai tambah (value added) daripada alokasi distribusi pemakaian input. Alokasi distribusi pemakaian input dimaksudkan adalah terjadinya redistribusi pemakaian input pada berbagai sektor ekonomi dalam masyarakat. Alokasi distribusi pemakaian input akan meningkat antara lain dapat disebabkan oleh adanya keseimbangan kebijakan dalam pembangunan sektoral antara lain dalam penyediaan infrastruktur dan pengembangan teknologi.

C. Implikasi Perubahan Struktur Terhadap Distribusi Pemakaian Input Antar Sektor Di Sektor Industri Tahun 1995

Di jelaskan di atas bahwa peningkatan output memiliki hubungan dengan alokasi input atau distribusi pemakaian input antar sektor dalam perekonomian. Peningkatan output dapat saja mempengaruhi atau dipengaruhi oleh distribusi pemakaian input.

Dalam kajian ini yang dimaksud dengan distribusi pemakaian input antar sektor dititikberatkan pada adanya hubungan yang lebih merata dari suatu sektor terhadap sektor-sektor lainnya. Dengan demikian apabila suatu sektor memperoleh indeks distribusi pemakaian input lebih besar dari satu, maka sektor tersebut memiliki kaitan ke belakang yang lebih beragam dan merata

dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Dengan kata lain pertumbuhan suatu sektor tidak hanya tergantung pada keberadaan suatu sektor saja, tetapi dipengaruhi pula oleh sektor lainnya secara lebih seimbang. Misalnya sektor ternak dan hasil-hasilnya dapat berkembang karena menggunakan input produk yang beragam dan merata dari sektor lainnya seperti sub sektor padi, jagung, tanaman umbi-umbian, sayur-sayuran dan buah-buahan, tanaman bahan makanan lainnya, industri makanan lainnya dan lain-lain.

Dengan demikian suatu sektor yang memiliki keterkaitan yang kuat belum tentu memiliki distribusi pemakaian input antar sektor yang lebih merata. Demikian pula suatu sektor yang memiliki indeks distribusi pemakaian input relatif bagus belum tentu memiliki keterkaitan kuat. Karena ada kemungkinan keterkaitan yang kuat hanya pada satu sektor saja baik ke belakang maupun ke depan. Atau dengan kata lain dalam proses produksi tidak ada variasi penggunaan input atau dari sisi output tidak ada variasi pasokan produk terhadap sektor-sektor lainnya. Sebagai contoh industri minyak kelapa memiliki keterkaitan ke belakang yang relatif kuat hanya pada sub sektor kelapa saja, sedangkan pada sektor lainnya memiliki keterkaitan ke belakang relatif rendah. Demikian juga outputnya tidak memiliki variasi dalam penggunaannya misalnya hanya digunakan untuk konsumsi rumah tangga.

1. Pengaruh Keterkaitan Ke Depan Dan Ke Belakang Terhadap Distribusi Pemakaian Input Antar Sektor Di Sektor Industri

Hasil perhitungan mengindikasikan adanya hubungan antara koefisien keterkaitan ke depan dan ke belakang dengan indeks distribusi pemakaian input antar sektoral. Sejauh mana pengaruh keterkaitan tersebut terhadap distribusi pemakaian input antar sektor dilakukan pengujian dengan menggunakan model regresi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel keterkaitan ke depan berpengaruh negatif terhadap distribusi pemakaian input antar sektor yang ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar $-1,05$; sebaliknya keterkaitan ke belakang berpengaruh positif terhadap distribusi pemakaian input antar sektor di sektor industri yang ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar $1,711$.

Hasil analisis ini mengandung pengertian bahwa semakin tinggi keterkaitan sektor industri ke depan, maka semakin rendah indeks distribusi pemakaian input yang berarti semakin timpang distribusi pemakaian input antar sektor. Hubungan positif dari keterkaitan ke belakang dengan indeks distribusi pemakaian input mengandung pengertian bahwa semakin tinggi keterkaitan industri ke belakang semakin tinggi indeks distribusi pemakaian input yang berarti distribusi pemakaian input antar sektor semakin bagus.

Hasil analisis ini bermakna pada dikotomi antara pertumbuhan dan dan pemerataan. Suatu industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi dampak pertumbuhan ekonominya relatif rendah sehingga dimensi pemerataannya relatif bagus. Sebaliknya suatu industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi dampak pertumbuhan ekonominya relatif tinggi sehingga dimensi pemerataannya relatif rendah. Kalau dilihat secara serempak menunjukkan bahwa 89 % perubahan distribusi pemakain input ditentukan oleh keterkaitan ke depan dan ke belakang sisanya sebesar 11% ditentukan oleh faktor lainnya.

2. Pengaruh Keterkaitan Ke Depan Dan Ke Belakang Terhadap Pengganda Pendapatan Di Sektor Industri

Angka pengganda baik pendapatan maupun tenaga kerja sangat penting untuk mendeteksi sektor mana yang memiliki kemampuan dalam menciptakan pendapatan wilayah. Besar kecilnya angka pengganda memiliki hubungan dengan penciptaan keterkaitan baik ke depan maupun ke belakang. Semakin besar keterkaitan semakin besar angka pengganda.

Untuk mengetahui sejauhmana hubungan tersebut maka dilakukan pengujian secara statistik dengan menggunakan model regresi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel keterkaitan ke depan berpengaruh positif terhadap koefisien

pengganda yang ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 2,31 Demikian pula keterkaitan ke belakang berpengaruh positif terhadap koefisien pengganda yang ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 2,67. Hasil analisis ini mengandung pengertian bahwa semakin tinggi keterkaitan sektor industri ke depan dan ke belakang, maka semakin tinggi pula indeks koefisien pengganda berarti semakin besar pendapatan dan kesempatan kerja yang tercipta dari suatu kegiatan investasi.

D. Implikasi Pengembangan Sektor industri Terhadap Distribusi Pendapatan Antar Sektor (dilihat Dari Nilai Tambah Bruto Tahun 1990 dan 1995)

Secara keseluruhan dalam kurun waktu 1990 dan 1995 terjadi ketimpangan antar sektor yang cukup serius yang dihitung berdasarkan nilai tambah bruto sektoral yang ditunjukkan oleh angka rasio gini masing-masing tahun 1990 dan 1995 sebesar 0,685 dan 0,674. Walaupun antara tahun 1990 dan 1995 terjadi penurunan angka rasio gini namun tidak signifikan yaitu hanya sebesar 0.011. Tingginya angka rasio gini menunjukkan tidak adanya keseimbangan dalam pembangunan sektor-sektor ekonomi dalam masyarakat.

Hal ini dapat dilihat dari masih terkonsentrasinya pengembangan sektor industri pada beberapa sektor saja di mana 20 % dan seklor ekonomi menghasilkan nilai tambah bruto sebesar

78 % sedangkan 80 % dari sektor ekonomi lainnya hanya menghasilkan nilai tambah bruto 22 %, bahkan 20 % sektor ekonomi lapisan bawah hanya menghasilkan nilai tambah bruto sebesar 0,09 %. Sektor-sektor yang menghasilkan nilai tambah tertinggi yang merupakan empat kelompok besar adalah sektor pemerintahan, sektor bangunan, perdagangan dan jasa pendidikan. Sedangkan sektor yang sama sekali tidak menghasilkan nilai tambah adalah sektor industri pengilangan migas, industri mesin dan alat-alat listrik dan kegiatan yang tidak termasuk di mana-mana.

Ketimpangan di sektor industri disebabkan oleh 20 % kelompok sektor industri penghasil nilai tambah tertinggi menghasilkan nilai tambah sebesar 82.3 % untuk tahun 1990 dan 84.5 % untuk tahun 1995. Sedangkan 20% kelompok sektor industri penghasil nilai tambah terendah hanya menghasilkan nilai tambah 0,07 % baik tahun 1990 maupun 1995.

Tiga kelompok sektor industri yang menghasilkan nilai tambah terbesar adalah sub sektor industri kayu, bambu dan rotan, sub sektor industri penggilingan padi dan sub sektor industri minyak kelapa untuk tahun 1990. Sedangkan untuk tahun 1995 nilai tambah terbesar diperoleh sub sektor industri kayu, bambu dan rotan, industri minyak kelapa dan industri makanan lainnya setelah terjadinya penurunan pada sub sektor industri penggilingan padi. Kelompok yang

tidak menghasilkan nilai tambah atau menghasilkan nilai tambah terendah adalah sub sektor industri pengilangan migas, industri mesin dan alat-alat listrik.

Ari Kuncoro (1997:3) lebih menekankan pada daya dukung infrastruktur, modal dan akses pasar yang menjadi penentu daya saing serta ketimpangan dalam masyarakat. Berbagai faktor di atas diindikasikan berperan dalam ketimpangan antar sektoral di Sulawesi Tengah. Misalnya secara struktural jenis industri dominan menghasilkan nilai tambah seperti industri kayu, bambu dan rotan, industri penggilingan padi, industri minyak kelapa industri makanan di atas tersebar di semua daerah tingkat II. Demikian pula secara kultural jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jenis industri di atas sudah digetuti masyarakat secara turun temurun.

Karena semua jenis industri dominan dalam menghasilkan nilai tambah umumnya tergolong sebagai industri kecil, maka tidak membutuhkan daya dukung infrastruktur dan modal relatif besar. Demikian pula akses pasar sudah cukup tersedia untuk melayani kebutuhan domestik selain melayani ekspor ke luar daerah seperti kayu, bambu dan rotan dikirim ke Surabaya minyak kelapa di kirim ke Manado untuk bahan baku industri minyak Bimoli.

Hal tersebut yang membedakan dengan industri lainnya seperti industri mesin, dan alat-alat

listrik, industri alat angkutan, industri pengilangan migas dan lain-lain yang dalam pengembangannya membutuhkan daya dukung infrastruktur dan modal relatif besar. Untuk itu di masa depan agar tercipta keseimbangan dalam pengembangan industri dibutuhkan komitmen pemerintah daerah Sulawesi Tengah dalam menyediakan infrastruktur dan akses pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Kuncoro (1997). *Pembangunan Regional, Daya Saing Antar Daerah dan Pembangunan Kawasan Tertinggal*. Seminar Berkala Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Cornelis Rintuh (1995). *Perekonomian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Dawam Rahardjo (1982). *Indonesia di Tengah_tengah Perekonomian Dunia Dewasa Ini*, Prisma, Jakarta.
- Didin S. Damanhuri (1981). *Sistem Subkontrak dalam Strategi Industrialisasi dan Pembangunan Ekonomi: Sebuah Gambaran Awal*, Prisma, Jakarta.
- Dergibson Siagian dan Sugiarto (2000). *Metode Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Drucker, F.P. (1986). *The Frontiers of Management*, Manajemen Lintas Peluang, PT. Gramedia, Jakarta.
- Dumairy (1996). *Perekonomian Indonesia*. Erlangga: Jakarta
- Hartarto (1086). *Perogram Keterkaitan Meningkatkan Nilai Tambah*, Prisma Nomor 1 Tahun XV, Jakarta.
- Hendra Esmara (1977). *PRoyeksi Pembagian Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2000*, Lembaga Penelitian

ekonomi Regional, Fakultas Ekonomi
Universitas Andalas, Padang.

- Hirschman, A.O. (1973). *Methods of Regional Analysis: An Introduction of Development, Empirical Investigations*, Harper
- Hill, H. (1989). *Indonesia's Industrial Transformasi*, Australin National University, Australia.
- Iwan J. Azis (1994). *Pengembangan Pembangunan Daerah di Indonesia*. Dalam M.A Anwar et.al. 1985. *Prospek dan Permasalahan Ekonomi Indonesia, 1985/1986*, FE UI.
- Jhiangan, M.L. (1975). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Johara T. Jayadinata (1992). *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, Wilayah*, Penerbit Institut Teknologi Bandung.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Nomor II Tahun 1993/1994 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.*
- Loekman Soetrisno (1997). *Memberdayakan Masyarakat dan Masalahnya di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penulisan Artikel bagi para Dosen, Pusat Dinamika Pembangunan, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Lucky W. Sondakh (1994). *Pembangunan Daerah dan Perekonomian Rakyat, Beberapa Ketimpangan antarkelompok Masyarakat*, Prisma.

- M. Suparmoko (1987). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Mudrajad Kuncoro (1997). *Ekonomi Pembangunan. Teori, Masalah dan Kebijakan*. Penerbit Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Nafziger, E.W. (1998). *The Economics of Developing Countries*, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 07458, Kansas State University. International Edition, United States.
- Olilingo Z. Facrhrudin (1992). Peranan Sektor Industri dalam Perekonomian Wilayah dan Prakteknya Terhadap Distribusi Pemakaian Input dan Ketimpangan Antar Sektor di Provinsi Sulawesi Tengah. Disertasi Program Pascasarjana. Universitas Padjajaran: Bandung
- Perindustrian Republik Indonesia (1996). *Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal*.
- Poot, H. (1992). *Industrialization and Trade in Indonesia*, Gajah Mada
- Redaksi Prisma (1976). *Pembagian Pendapatan di Indonesia*, Sketsa Pandang, Prisma, Jakarta.
- Rizal Ramli (1982). *Industri Indonesia antara Tujuan dan Kenyataan*, Prisma, Jakarta.

- Sadono Sukirno (1976). *Beberapa Aspek dalam Pembangunan Daerah*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- (1985). *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Sam F. Poli (1995). *Konsep Adil dan Makmur, Ketimpangan Distribusi Pendapatan*, Prisma, Jakarta.
- Sanusi Anwar. (1998). Pengaruh Alokasi Sumber Dana Terhadap Perubahan Struktur Produksi dan Distribusi Pendapatan Antar Daerah Di Indonesia. Disertasi Program Pascasarjana UNPAD: Bandung
- Sugeng Budiharsono (1989). *Perencanaan Pembangunan Wilayah, Teori, Model Perencanaan dan Penerapannya*, Desertasi rogram Pascasarjana, Bogor.
- Sulawesi Tengah Dalam Angka tahun 1997.
Tabel Input-Output Sulawesi Tengah, 1990 dan 1995.
- Thee Kian Wie (1980). *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, Beberapa Pendekatan Alternatif*, LP3ES, Jakarta.
- Todaro, M.P. (1994). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Usman Hardi (1996). *Pola Perekonomian Indonesia 2020 (Suatu Pemikiran Awal)*, Universitas Padjajaran, Bandung.